

**Analisis Ekonomi Politik
Terhadap Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining di Kec.
Parado Kab. Bima NTB Tahun 2016**



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Politik

Oleh:

ABDUL KHALIK
NIM: 30600113049

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Khalik
Nim : 30600113049
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Program Studi : S1
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kehadiran PT.
Sumbawa Timur Mining di Kecamatan Parado Kab.
Bima NTB Tahun 2016.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiansi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji.

Samata Gowa, September 2017

Yang menyatakan

Abdul Khalik
NIM: 30600113049

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining di Kec. Parado Kab. Bima NTB Tahun 2016." Yang disusun oleh Abdul Khalik, Nim : 30600113049, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 11 September 2017 M, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dalam Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa Perbaikan).

Makassar, 15 September, 2017 M

23 Zulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

- | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. Abdullah, S. Ag., M. Ag. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Dr. Syahrir Karim, M.Si., Ph.D. | (.....) |
| 3. Penguji I | : Dr. Syarifudin Jurdi, M.Si. | (.....) |
| 4. Penguji II | : Wahyuni, S.Sos., M.Si. | (.....) |
| 5. Pembimbing I | : Dr. Abdullah, S. Ag., M. Ag. | (.....) |
| 6. Pembimbing II | : Nur Aliyah Zainal, S.IP., M.A. | (.....) |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A

NIP. 49590704 198903 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Pujisyukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya pada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut membuat penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul; **“Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining di Kec. Parado Kab. Bima NTB Tahun 2016”**. yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

Perjalanan dalam meraih pengetahuan selama ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dengan nilai yang tak terhingga. Ketekunan dan keseriusan senantiasa diiringi do'a telah mengantarkan penulis untuk mendapatkan semestinya, walaupun tidak seutuhnya. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang diperoleh selama ini adalah perjuangan bersama. Dukungan, semangat dan perhatian yang tulus menjadi dasar semangat baru dalam mengiringi perjalanan penulis untuk menyelesaikan pengembaraan dalam dunia pengetahuan.

Solawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Nabi yang telah berjuang dan sukses dengan perjuangan tersebut untuk merubah peradaban dan tatanan kehidupan umat manusia dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman kegelapan menuju cahaya kehidupan yang hakiki (Islam).

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan dan motivasi dari semua pihak, karya ini terkhusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis: : **Ayahanda Tersayang Syamsuddin Ahmad** dan **Ibunda Tercinta Fatimah Ahmad** yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis dan Adik-adik penulis **Suhaedah, Abdul Fatah, Mataul Hayati, Muslimahturridho**, Semoga Allah membalas jasa dan kebaikan serta perjuangan selama hidupnya untuk menyekolahkan penulis sampai saat ini dengan balasan yang setimpal yaitu surganya. Amiin,

Dalam Kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. **Prof. Dr. Musaffir, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar**. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. **Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA**. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.

3. **Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si.** Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik, sekaligus Dosen Penguji I Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan mulai dari pertama kali masuk kuliah sampai selesai kuliah.
4. **Syahrir Karim, M.Si., Ph.D** Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. serta stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. **Dr. Abdullah, M.Ag** selaku Wakil Dekan III, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan mulai dari membuat proposal dan sampai mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. **Nur Aliyah Zainal, S.IP.,M.A** selaku **Pembimbing II** yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, nasehat, saran, mulai dari membuat proposal dan sampai mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. **Wahyuni, S.Sos., M.Si.** selaku Penguji II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan mulai dari ujian hasil sampai ujian tutup.
8. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang berguna selama penulis melakukan studi.
9. Kepala Perpustakaan Umum UIN Alauddin, Perpustakaan Ushuluddin Filsafat dan Politik, Perpustakaan Wilayah.

10. Seluruh Keluarga Besar Penulis, terkhusus dan teristimewa untuk Kakek Buyut Tercinta **H. Abdurrahman**, Kakek Tersayang **Ahmad H. Abdurrahman**, Tante tersayang dan tercinta seperti orang tua penulis sendiri **Dra, Hj. St Aminah**, dan **Nenek Hj. Mariyam** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi baik berupa materi maupun non materi buat penulis.
11. Teman-teman dan sahabat-sahabat Ilmu Politik terkhusus untuk Angkatan 2013 IPO 3&4 yang telah menjadi teman terbaik dan terhebat bagi penulis sepanjang Zaman
12. **Abd. Anas S.Hi, M.H.**
13. **H. Abdul Wahab** Pemilik Pondok Nurfadli.
14. Saudara-saudara sepondokan kurang lebih dua tahun, **Ahmad S.Hum, Fauzi S,Ikom, Irwansyah S.Hum, Agis, S.Hum, Subhan, Ipul, Tris, Buhari, Abdurrahman, Ahmad Yani, Aco, adek2, Aksa, Yusran, Yunus, Zikir, Ical, Amin, Nasar**, yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman Seperjuangan Ikatan Mahasiswa Parado (IMPAR) Makassar yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini
16. Saudara-saudari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini
17. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini
18. Racana Pramuka UIN Alauddin Makassar Cabang Makassar yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini

19. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini
20. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Bima Dompu (HMBD) yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini
21. Teman-teman KKN Reguler Angkatan Ke-53 UIN Alauddin Makassar, di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bajeng, Desa Maccini Baji, Nurfazrianti, Rika Nurjannah, Fitriani, Novitasari, Adiel.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membangun penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb

Makassar, September 2017

Penyusun

Abdul Khalik
NIM: 30600113049

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penulisan	9
E. Telaah Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORETIS	15
A. Tinjauan Umum Teori Ekonomi Politik.....	15
1. Teori Ekonomi Politik.....	15
2. Perspektif Ekonomi Politik	17
3. Ekonomi Politik dan Konflik	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	29
G. Pengujian Keabsahan Data.....	31
H. Kerangka Konseptual	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Bima dan Kecamatan Parado	33
B. Analisis Hasil Penelitian	49
1. Kebijakan Pemerintah Memberikan Ijin Berdirinya PT. Sumbawa Timur Mining	49
2. Respon Masyarakat Terhadap Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining	61
3. Eksploitasi Sumber Daya Alam Oleh PT. Sumbawa Timur Mining	67
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Implikasi Penelitian.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Peta Wilayah Kecamatan Parado	
Peta Lokasi Pertambangan dan Embung <i>Sori Bura</i> (Sungai Putih)	

DAFTAR TABEL, SKEMA DAN PETA

1. Tabel I Data Luas Wilayah Per Kecamatan Kab. Bima.....	34
2. Tabel II Luas Wilayah Perdesa Kecamatan Parado	41
3. Tabel III Jumlah Penduduk Kecamatan Parado	41
4. Tabel IV Keadaan Penduduk Kecamatan Parado Tingkat Pendidikan	43
5. Tabel V Jumlah Penduduk Masyarakat Parado Menurut Mata Pencarian	
6. Tabel VI Kronologi Peristiwa Perlawanan Rakyat Parado	75



ABSTRAK

Nama : Abdul Khalik
Nim : 30600113049
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kehadiran PT Sumbawa Timur Mining di Kec. Parado Kab. Bima NTB Tahun 2016.

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam memberikan Izin Berdirinya PT. Sumbawa Timur Mining di Kecamatan Parado Kab. Bima NTB dan memberikan gambaran mengenai respon masyarakat terhadap kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining serta memberikan juga gambaran mengenai eksplorasi sumber daya alam oleh PT. Sumbawa Timur Mining .

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu: Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan ada 2 teknik yaitu *Teknik Library Research* (penelitian pustaka sebagai bekal awal dalam penelitian lapangan) dan *Teknik Field Research* (penelitian lapangan) melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode model Miles dan Huberman dengan menggunakan 3 tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan)

Hasil penelitian tentang ekonomi politik yang terjadi di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yaitu menunjukkan bahwa a. Kebijakan Pemerintah memberikan Izin Berdirinya PT. Sumbawa Timur Mining kurang tepat karena tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu b. Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining memberikan dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Parado tapi dalam skala kecil, dampak yang lebih besar dihasilkan oleh PT Sumbawa Timur Mining ialah dampak yang negatif.

Implikasi dari penelitian tentang ekonomi politik di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut 1. Kepada pemerintah agar kiranya mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam konsolidasi. Khususnya pada kasus pertambangan. 2. Kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan kondisi dan upaya-upaya provokasi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Kepada stakeholder (perusahaan, pemerintah dan seluruh masyarakat) agar kiranya harus memperhatikan kondisi ekologis dan sosial dalam suatu daerah sebelum melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalam suatu daerah.

Kata Kunci, Ekonomi Politik, Pertambangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bima berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pada dasarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dengan dasar itulah pemerintah membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk melakukan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kab. Bima.

Eksplorasi pertambangan di Kab. Bima, didukung oleh kondisi Kab. Bima yang memiliki sejumlah potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDM), bahan galian berupa emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu hampir menyebar diseluruh wilayah di Kabupaten Bima hingga ke tingkat Kecamatan. Eksplorasi tambang di Kab. Bima digadang-gadang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, membuka tenaga kerja bagi tenaga pengangguran dan tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.²

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (Cet. V; Jakarta: Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015), h. 13. Lihat juga Abu Rokhman, *Negara VS Petani: Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Hutan Negara Perspektif Sosio-Legal dan Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 3.

²LARD NTB, *Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan di Lambu Bima NTB dengan IUP Nomor 188.45/346/2010 dan Model Penyelesaian Konflik yang Tepat untuk Meminimalisir Benih Konflik Terkait Izin Pertambangan di Dompu 26 November 2012*, di akses pada halaman: <http://lardntb.blogspot.co.id/2014/02/belajar-resolusi-konflik-kasus-tambang.html?l=1>, tanggal 07 Februari 2017.

Berdasarkan data dinas pertambangan dan energi (Distamben) Kab. Bima terdapat 14 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebagai penyesuaian dari kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan pemerintah Kab. Bima sebelumnya.³ Kebijakan tersebut melahirkan sikap pro dan kontra pada lapisan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi serta adanya kepentingan yang berbeda antara Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat mayoritas petani sebagai pemilik lahan.

Salah satu kecamatan yang merupakan lokasi pertambangan dari 14 izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Kec. Parado. Masuknya pertambangan di Kec. Parado melalui SK Bupati Bima dengan izin usaha pertambangan (IUP) nomor 88.45/348/004/2010. Dikelola oleh PT. Sumbawa Timur Mining. Kecamatan Parado merupakan kecamatan baru, pemekaran dari Kecamatan Monta yang terdiri dari beberapa desa di antaranya: Desa Parado Rato, Parado Wane, Parado Kanca, Kuta Parado dan Parado Lere.⁴

Kehadiran pertambangan di Kecamatan Parado menuai sikap pro dan kontra di antara masyarakat. Masyarakat suatu pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan masyarakat pedesaan biasanya dikelompokkan atas dasar sistem kekeluargaan.⁵

³Muhammad Erwin, "Resistensi Politik Masyarakat terhadap Korporasi: Kekerasan massa dalam Aksi Penolakan izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima." *Tesis*, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2014), h. 63.

⁴Muhammad Erwin, "Resistensi Politik Masyarakat terhadap Korporasi: Kekerasan massa dalam Aksi Penolakan izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima." *Tesis*, h. 63.

⁵Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. XXXVII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 153.

Adanya hubungan yang erat di antara masyarakat dalam dalam satu Desa, mendorong lahirnya kesamaan sikap dalam merespon suatu kebijakan pemerintah, yang diakomodir atas nama desa. Sehingga sikap pro dan kontra pun melibatkan desa masing-masing. Pada masyarakat Kec. Parado sikap pro dan kontra lebih dominan ditunjukkan oleh masyarakat Desa Parado Rato dan Parado Wane. Dimana masyarakat Desa Parado Rato sebagai mayoritas yang menolak kehadiran pertambangan, dan masyarakat Desa Parado Wane sebagai mayoritas yang mendukung kehadiran pertambangan.

Bagi masyarakat Parado Rato yang menolak kehadiran pertambangan, setidaknya mempunyai tiga alasan mengapa sampai menolak kehadiran pertambangan di Kec. Parado, yaitu: 1) isu tanah (agraria), tanah bagi masyarakat adalah tempat bergantung hidup karena profesi dan mata pencaharian utama masyarakat Parado adalah dengan bertani dan berkebun; 2) isu lingkungan, kekhawatiran terbesar masyarakat disamping isu tanah, juga berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal yang akan tercemar karena limbah pertambangan; dan 3) isu budaya, masyarakat Kec. Parado dengan mayoritas penduduknya 100 % muslim memiliki kekhawatiran yang besar dengan kehadiran pertambangan, kekhawatiran tersebut, bahwa adanya pertambangan akan memberikan ruang besar terhadap munculnya tempat prostitusi, baik di lokasi sekitar pertambangan bahkan bisa jadi akan sampai di sekitar pemukiman warga.

Kekhawatiran tersebut didukung oleh pemahaman para tokoh agama dan mahasiswa atas peringatan Allah dalam al-Qur'an yang menggambarkan kerusakan alam, akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri, sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah swt., pada QS. ar-Rum/ 30 : 41 yang berbunyi.

ظَهَرَ أَفْسَادٌ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶

Surat ar-Rum merupakan surah yang 30 dan terdiri dari 60 ayat serta termasuk dalam kategori surah *makiyyah*. Yang mana dalam pembahasan ayat 41 ini menjelaskan tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan alam, karena sebagai khalifah Allah manusia wajib memelihara segala apa yang Allah ciptakan di muka Bumi.

Ayat tersebut menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya kerusakan. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan pembunuhan di kedua tempat tersebut. Dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidak seimbangan dan kurangnya manfaat laut. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Al-hasil keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.⁷ Ayat ini pula yang biasa menjadi bahan para orator ketika menyampaikan orasinya untuk menggambarkan kepada masyarakat akan bahaya kehadiran pertambangan.

Sementara bagi masyarakat yang mendukung kehadiran pertambangan. Kehadiran pertambangan dinilai bisa memberikan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran serta memperbaiki nasib. Sehingga dengan alasan itulah mendorong masyarakat tetap pada pendirinya, sikap pro dan kontra antara masyarakat Desa Parado Rato dan Desa Parado Wane tidak hanya

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), h. 576.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 76-77.

sebatas adanya perbedaan dalam menyikapi kehadiran pertambangan, akan tetapi sampai berujung pada terjadinya perang antar desa.

Rentetan dari sikap pro dan kontra masyarakat Desa Parado Rato dan Parado Wane, berimplikasi pada kehidupan sosial lainnya, seperti adanya perkelahian antar pemuda dari kedua desa bahkan puncak dari ketegangan antara kedua desa tersebut adalah setelah terbunuhnya Kaur Desa Parado Wane pada tahun 2015 dan terbunuhnya Kepala Desa Parado Rato pada tahun 2016 lalu. Sejak peristiwa itu sampai saat ini ketegangan antara kedua desa pun masih dirasakan.

Konflik yang terjadi pada masyarakat Kec. Parado dalam hal ini Desa Parado Rato dan Parado Wane, awalnya merupakan konflik masyarakat dengan negara sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan dari pemerintah daerah yang memberi ruang untuk ijin usaha pertambangan yang kemudian berubah menjadi konflik antar desa.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung.⁸ Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa yang dapat

⁸Disa Nursiah “*Konsep Hukum Islam dalam Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia: Kasus Tarakan Jl. Ampora Jakarta*” dalam Muhammad Shuhufi, Kontruksi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Makassar: Pustaka al-Maida, 2017), h. 93.

diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik, sehingga menimbulkan kekerasan, dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Tentunya semua konflik butuh penyelesaian dan penanganan khusus oleh pihak-pihak tertentu, di antaranya aparat kepolisian. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Pada kenyataannya kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Parado sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian Resort (Polres) Bima tidak dapat mengaktualisasikan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya menurut Undang-undang tersebut dengan maksimal. Salah satu penyebabnya karena kepolisian telah kehilangan wibawanya dimata masyarakat yang dinilai cenderung menjadi pembela dan pelindung kepentingan penguasa dan investor.

Kepolisian sebagai institusi negara tidak lagi diperhitungkan keberadaannya, sehingga penegakkan hukum di Kec. Parado tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, semakin merajalelanya perbuatan yang meresahkan ketertiban umum serta peningkatan angka kriminalitas, seperti pencurian kendaraan roda dua, hewan ternak, perkelahian antar pemuda, balapan liar, perjudian sampai pada penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Peran serta Pemerintah juga sangat penting dalam meredam setiap gejala konflik dan dinamika sosial lainnya, yang sudah merupakan tugas dan kewajiban pemerintah. Langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah dengan

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

melakukan pendekatan persuasif dan negosiasi, sehingga antara masyarakat sebagai pemilik lahan dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dapat berdialog untuk menemukan jalan keluar terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga tidak sampai mengarah pada hal-hal yang tidak diharapkan.

Pada kenyataannya ruang-ruang dialog tersebut tidak maksimal dilakukan oleh pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat. Justru pemerintah lebih memilih menjadikan kepolisian yang merupakan alat negara untuk membendung aksi penolakan masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian, menyebabkan terjadinya perlawanan dari masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam mengawal dan mengamankan aksi masyarakat. Pada akhirnya berujung pada terjadinya konflik antara keduanya.

Bagi masyarakat Kec. Parado secara umum, sangat mengharapkan kedamaian dan keamanan dalam kehidupan sosial, karena rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak ada satu pun manusia yang menginginkan celaka dan terganggu hidupnya oleh perbuatan orang lain. Bila dicermati kebutuhan akan rasa aman, sama dengan kebutuhan akan pangan dan sandang. Hidup tidak akan selaras dan aman jika manusia berada dalam bahaya. Sebaliknya hidup akan tenteram jika bahaya-bahaya yang menghadangnya dapat diatasi. Ketidakamanan akan mempengaruhi kehidupan, bukan hanya diri sendiri namun juga masyarakat secara umum.

Berangkat dari itu, peneliti merasa tertantang untuk melakukan penelitian terkait kebijakan pemerintah dan respon masyarakat terhadap eksistensi pengelolaan tambang di Kec. Parado. Untuk menemukan jawaban terhadap persoalan tersebut maka dipilihlah judul skripsi **“Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining di Kec. Parado Kab. Bima NTB Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis ekonomi politik terhadap kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining di Kecamatan Parado Kabupaten Bima NTB Tahun 2016”. Untuk menjawab pokok masalah tersebut, maka penulis jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Ijin Berdirinya PT. Sumbawa Timur Mining Tahun 2016 ?
- b. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining Tahun 2016 ?
- c. Bagaimana Eksplorasi Sumber Daya Alam oleh PT. Sumbawa Timur Mining Tahun 2016 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan ijin terhadap kehadiran PT Sumbawa Timur Mining Tahun 2016;
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining Tahun 2016;
3. Untuk mengetahui eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh PT. Sumbawa Timur Mining Tahun 2016 ?

b. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi di dalam menambah nuansa pada literature-literatur ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya terkait dengan analisis ekonomi politik terhadap kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining di Kecamatan Parado.
- b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti berikutnya yang akan meneliti seputar informasi pola kebijakan pemerintah yang menuai respon masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami akan besar dan pentingnya kebijakan pemerintah terhadap untuk masyarakatnya, dimanapun itu berada. Dan juga menjadi referensi penting dalam melihat kebijakan pemerintah dan masyarakat terhadap aktivitas apapun.
- b. Dan juga dapat menjadi bahan pendidikan moral sekalipun contoh panutan bagi tempat lain dalam regulasi pemerintah dalam membangun masyarakat yang diaturnya melalui jalan yang sudah di tetapkan untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya urgensi tinjauan pustaka adalah sebagai auto kritik terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian penelitian terdahulu. Untuk menghindari pengulangan hasil

temuan yang membahas permasalahan yang sama baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku maupun tulisan-tulisan. Sebagai bahan komparatif di atas, penelitian kali ini akan mengemukakan hasil temuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian ini untuk dijadikan bahan perbandingan selanjutnya. Adapun penelitian yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut ini:

Fachuruddin Fahmy Siregar, melakukan penelitian dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru (Studi Kasus di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan)”*. Penelitian dilaksanakan dengan metode deskriptif, pada tingkat persepsi menggunakan skala likert dan untuk melihat hubungan sosio-ekonomi terhadap persepsi masyarakat setempat tentang pembukaan pertambangan emas di Kawasan Hutan Batang Toru dengan menggunakan korelasi Spearman Rank. Jumlah sampel sebanyak 80 KK. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner, wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Aek Pining dan Desa Napa belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang pertambangan dan hutan. Masyarakat juga memandang positif keberadaan pertambangan di Kecamatan Batang Toru karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran meskipun hal tersebut baru dirasakan sebagian masyarakat.

Maykel, *“Studi penelitian ini berjudul Politik Manajemen Pertambangan "Basis" (Non-Logam Tambang Mineral) di Kabupaten Kunto Darussalam 2010-2013”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketiadaan peraturan dasar pertambangan di kabupaten Rokan Hulu

dengan menganalisa eksistensi sewa mencari praktik yang terjadi dalam pengelolaan basis pertambangan di Kabupaten Kunto Darussalam. Menyewa Teori pencarian adalah teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini, disamping konsepnya Negara bayangan juga digunakan untuk menggambarkan bentuk praktik pencarian sewa dan dampaknya pada manajemen basis pertambangan di Kabupaten Kunto Darussalam. Objek penelitian ini adalah pengelolaan pertambangan Basis di Kabupaten Kunto Darussalam dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu. Menyewa mencari praktik pengelolaan basis pertambangan dalam melakukan pejabat departemen pertambangan dan energi rokan kabupaten hulu dengan operator tambang dan pejabat jasa keuangan dan pengelolaan setrokan Kabupaten hulu dengan basis kontraktor dalam penentuan basis pajak. Praktek mencari sewa adalah melahirkan bayangan mereka di tubuh hulu rokan kabupaten pemerintah daerah yang membuat peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan di kabupaten hulu rokan tidak terealisasi.

Hamzah Kurniawan, melakukan penelitian dengan judul “*Persistensi dan Resistensi Masyarakat terhadap Eksistensi Pertambangan Emas di Desa Bonto Katute, Kabupaten Sinjai*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah ditetapkan izin eksplorasi penambangan secara umum masyarakat Desa Bonto Katute terbagi menjadi dua kelompok yakni masyarakat yang menerima kemudian mendukung (persistensi) dan masyarakat yang menolak (resistensi) terhadap eksplorasi penambangan emas. Mereka yang mendukung penambangan adalah seluruh aparat Desa beserta keluarga dekatnya. Dengan berbagai alasan seperti, karena kegiatan ini masih sebatas eksplorasi, dan karna ini sudah

merupakan perintah dari pemerintah daerah. Sementara mereka yang menolak terbagi menjadi dua yakni warga dan terlibat secara aktif (diskusi, kampanye dan aksi), dan yang menolak dalam posisi passif (menolak berkomentar karena takut). alasan mereka menolak penambangnpun berfaritif, mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan nilai-nilai budaya yang kelak akan mengalami degradasi.

Suriansyah, melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pertambangan Terhadap Fungsi Ekonomi Lingkungan dan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pertambangan Bijih Besi PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi)”. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey yang merupakan kombinasi dari “*descriptiveresearch*” dan “*problem solving research*”. Jumlah responden sebanyak 91 orang yaitu (20% dari populasi). Analisis data dilakukan secara kuantitatif, dan deskriptif dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan yang telah mengubah manfaat sumberdaya bersifat common pool goods yaitu sumberdaya yang dikuasai bersama yang mampu menghasilkan tambahan pendapatan yang cukup nyata, menjadi sumberdaya alam bersifat private goods yaitu sumberdaya apabila dimanfaatkan oleh individu-individu secara sendiri akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Denganberubahnya pemanfaatan sumberdaya alam tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, hal ini terbukti sebelum adanya pertambangan pendapatan rata-rata masyarakat Rp1.253.571/KK/bulan setelah adanya pertambangan menjadi Rp1.193.565/KK/bulan, penurunan pendapatan masyarakat dikarenakan oleh

hilangnya lahan perkebunan dan pertanian serta akses pemanfaatan hutan. Kenyataan menunjukkan bahwa konversi lahan perkebunan dan hutan untuk KP (Kuasa Pertambangan) oleh PT Juya Aceh Mining bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar pertambangan tidak menguntungkan. Demikian juga dapat dilihat dari segi persepsi terhadap kehadiran pertambangan, sebesar 56,1% masyarakat menunjukkan sikap setuju dan 35,2% masyarakat tidak setuju.

Persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat sangat tergantung pada dampak yang dirasakan dari hadirnya pertambangan. Masyarakat yang setuju karena merasakan dampak positif, atau tidak merasa dirugikan dengan kehadiran pertambangan. Sedangkan yang tidak setuju karena besarnya dampak negatif yang mereka rasakan seperti hilangnya lahan perkebunan dan pertanian, lapangan kerja serta akses ke hutan akibat dari kegiatan pertambangan.

Agus Purbathin Hadi, melakukan penelitian dengan judul ‘*Persepsi Komunitas Setempat Terhadap Perusahaan Pertambangan di Kawasan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa*’. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan diskusi kelompok terarah. Populasi penelitian adalah anggota komunitas di sekitar lokasi pertambangan Batu Hijau yang meliputi Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Taliwang, dengan jumlah responden seluruhnya 150 orang.

Persepsi tentang perusahaan diukur dari pengamatan dan pengalaman responden menyangkut keberadaan perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif berbasis tabulasi, dan setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas yang

memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan lebih banyak dari yang bersikap positif, sehingga dari keragaan persepsi komunitas tersebut dapat disimpulkan bahwa program pengembangan komunitas yang dilaksanakan perusahaan belum mampu menciptakan persepsi positif komunitas terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan karena dalam program pengembangan komunitas perusahaan lebih berorientasi pada kegiatan fisik daripada mengupayakan perubahan perilaku komunitas melalui pendekatan budaya dan psikologis.



BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Teori Ekonomi Politik

1. Teori Ekonomi Politik

Dalam pendekatan klasik Adam Smith, istilah ekonomi politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku yang independen. Ada beberapa istilah yang berbeda maknanya tetapi masih terkait satu dengan yang lainnya, yaitu masyarakat sipil, ekonomi pasar, masyarakat borjuis, kapitalisme dan masih banyak lagi. Semua istilah itu merujuk pada pola masyarakat dimana sistem ekonominya menjadi paling menonjol dari pada sistem politiknya. Ketika masyarakat menjadi besar dan kuat sistem ekonomi ini akan mengeser sistem politik biarpun awalnya sistem ekonomi ini tumbuh dari naungan sistem politik.¹⁰

Masyarakat sipil di sini dimulai dari sistem produksi barang-barang sehari-hari terjadi dalam sebuah keluarga atau kelompok kerabat dan dalam pembagian kerja tertentu. Tujuan dan hubungan ini antara lain keharusan untuk melakukan reproduksi biologis, kebutuhan untuk membesarkan dan mengasuh anak, kebutuhan untuk menumbuhkan kepribadian, kebutuhan untuk mendidik anak dan sebagainya.¹¹ Setelah sistem perekonomian terbentuk dalam keluarga, ada kebutuhan yang tidak bisa di capai selain dengan melibatkan orang lain maka lahirlah sistem pasar untuk tukar menukar. Pasar akan berjan dengan baik ketika

¹⁰James A. Caporaso, David P. Lavine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 76. Lihat juga dalam buku Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Politik, Kajian Teori dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 23-45.

¹¹James A. Caporaso, David P. Lavine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, h. 76-77.

individu bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual. Ketika tiap-tiap pelaku dalam pasar bertindak sebagai pembeli dan penjual, maka uang dan komoditas akan berputar di dalam pasar. Pasar berfungsi sebagai sekedar memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari para pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Di dalam bentuk ini pasar menjadi sistem yang sempurna untuk stabilitas harga komoditas, karena pasar bisa meregulasi dirinya sendiri ketika ada sistem yang macet.¹²

Ketika pasar berjalan normal tanpa ada regulasi dari luar, maka pasar akan menjamin bahwa kapital masyarakat akan dimanfaatkan secara sepenuhnya. Sebuah masyarakat memiliki kapital dan tenaga kerja dalam jumlah tertentu, dimana besarnya porsi kapital dan tenaga kerja yang diberikan terhadap berbagai industri yang ada dalam masyarakat akan tergantung pada profitabilitas mengukur kontribusi dari tiap-tiap industri terhadap pendapatan masyarakat dan pertumbuhan dari kekayaan masyarakat.¹³ Kepentingan publik memiliki kaitan dengan kepentingan pribadi, meskipun kepentingan berbeda, yaitu bahwa kepentingan publik adalah untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. Produk nasional yang berukuran besar dan terus bertumbuh juga dapat menguntungkan individu maupun negara. Jadi pasar swasta atau pasar bebas adalah cara terbaik untuk mencapai kepentingan publik tersebut.

Prinsip pengambilan keputusan dalam ekonomi (efisiensi) sering, atau bisa bertentangan dengan pengambilan keputusan dalam politik. Hal ini menyebabkan dalam kondisi lingkungan politik tertentu, mungkin saja terjadi

¹²James A. Caporaso, David P. Lavine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, h. 83-87.

¹³James A. Caporaso, David P. Lavine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, h. 94-96.

interaksi antara keputusan ekonomi dan politik. Hal ini mengingat masyarakat bukan hanya sebagai konsumen dan produsen, melainkan juga sebagai warga negara dengan berbagai afiliasi politiknya. Dengan kekuatan politiknya mereka tidak hanya dapat mengatur pasar, melainkan dapat pula mengambil alih secara langsung sumber daya yang ada di negaranya. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan para ekonom hampir tidak bisa melakukan prediksi ekonomi tanpa membuat prediksi tentang respon politik yang mungkin bisa menghasilkan keputusan yang berbeda.¹⁴

2. Perspektif Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan sebuah pendekatan lain dalam kajian ekonomi maupun politik. Meskipun keduanya adalah dua kajian yang berbeda namun keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ekonomi tidaklah berada dalam ruang hampa yang bebas dari pengaruh dinamika politik, demikian juga politik tidak bisa lepas dari dinamika perekonomian. Sama halnya dijelaskan oleh Ahmad Erani Yustika bahwa meskipun analisis ekonomi dan analisis politik berbeda karena memiliki dasar yang berbeda namun dalam pendekatan ekonomi dapat mengaitkan penyelenggaraan politik baik yang menyangkut proses, aspek maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Artinya mekanisme pasar, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dipengaruhi dinamika politik yang sedang terjadi.¹⁵

Lebih lanjut Ahmad Erani Yustika, ekonomi politik percaya struktur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sedangkan pendekatan

¹⁴Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 4

¹⁵Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik, kajian teoritis dan analisis empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 7-8.

ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan terjadi begitu saja (given).¹⁶ Hal ini dapat dilihat bagaimana sistem politik yang menganut liberalisasi sehingga membuat kita terperosok dalam demokrasi liberal. Demokrasi yang memberi keleluasaan pada siapa saja untuk berkompetisi, asalkan memiliki kemampuan terutama finansial karena mahal biaya politik. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh para elite ekonomi (pengusaha) untuk ikut berkontestasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mereka bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ada juga yang melakukannya secara tidak langsung dengan menunjuk atau mendukung salah satu kandidat wakil rakyat dengan sokongan dana yang besar.

Dalam kajian ekonomi politik, ketika kebijakan ekonomi dikeluarkan bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Ada agenda lain kekuasaan tertentu dari sistem ekonomi yang berlangsung, sehingga Ahmad Erani Yustika mengatakan pendekatan ekonomi politik dalam prakteknya selalu mempertimbangan dan memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian wajar jika kebijakan selalu mendapatkan pro dan kontra di masyarakat.¹⁷ Apalagi sekarang, Indonesia memasuki fase perpolitikan era desentralisasi. Sistem politik yang terbuka dan lemahnya kontrol masyarakat lokal terhadap pemerintahan sehingga kebijakan ekonomi sangat rentan dengan kepentingan politik. Terlebih sejalan dengan konsep demokrasi kita yang liberal dan ekonomi yang neoliberal, maka politik akan terjebak pada biaya politik yang mahal. Tak pelak lagi, kekuasaan pemodal yang memainkan peran

¹⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik, kajian teoritis dan analisis empiris*, h. 2.

¹⁷ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik, kajian teoritis dan analisis empiris*, h. 9-15.

besar dalam kebijakan ekonomi. Hingga berujung pada pendiktean institusi politik maupun ekonomi yang diarahkan pada kepentingan para pemilik modal.

Martin Staniland yang dikutip oleh Mawardin menyebutkan ekonomi politik akan membicarakan bagaimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan bagaimana institusi ekonomi mempengaruhi politik. Kedua aspek ini berhubungan satu sama lain.¹⁸ Kita dapat melihat contoh yang dihadapi oleh negara-negara di dunia terutama negara berkembang yang mengalami permasalahan ekonomi yang belum tuntas. Begitu pula dengan negara-negara maju selain mempertahankan hegemoni ekonomi politiknya juga bagaimana melakukan ekspansi ideologi ekonomi maupun politik ke negara-negara lainnya di dunia. Dalam banyak indikator, kemajuan ekonomi akan mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara. Demikian pula sebaliknya. Bahwa demokrasi yang berkualitas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam faktanya, kondisi ekonomi dunia justru membangun sebuah sistem ekonomi yang timpang. Pasalnya kebijakan ekonomi yang dominan adalah ekonomi yang menjadikan pemodal sebagai pengendali utama, dengan pasar bebas sebagai kendaraannya.

Negara maju dengan segala modal dan korporasinya, menjebak semua negara untuk masuk dalam perangkat neoliberalisme yang diusungnya. Konsep ekonomi ini bukannya menciptakan keadilan ekonomi, melainkan hanya menjebak pada permasalahan ekonomi yang tak berkesudahan. Negara maju yang selalu mengampanyekan tentang perlunya menegakan nilai-nilai demokrasi, malah menjadi penghambat karena akumulasi kekayaan ekonomi terkonsentrasi

¹⁸Mawardin, *Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Israel dalam Perspektif Ekonomi Politik*. (Makassar: Unhas, 2011), h. 46.

pada mereka. Negara-negara berkembang yang kaya akan hasil alam justru mengalami penderitaan ekonomi memprihatinkan. Ini bertolak belakang dengan agenda yang selalu digemakan oleh negara-negara maju untuk menegakan nilai-nilai demokrasi, justru mereka sendiri yang melanggarnya. Pasalnya dengan model kebijakan ekonomi politik ini membuat kualitas ekonomi yang berpengaruh pada kualitas demokrasi, menjadi lebih buruk. Dominasi peran modal dan pasar serta keberadaan korporasi sebagai pemain utama, secara tidak langsung dapat mempengaruhi dan mengendalikan arah politik yang ada.

Tidak jauh berbeda dengan Didik J. Rachbini, lebih memperkenalkan pendekatan ekonomi politik baru. Menurutnya, ekonomi politik baru yakni bagaimana memahami realitas politik berdasarkan analisis yang dianalogikan individu sebagai aktor. Lebih lanjut diuraikan individu adalah makhluk yang egois serta memiliki kepentingan atas pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihan ini kemudian diupayakan secara maksimal untuk dicapai demi kepentingan dirinya karena merupakan hak miliknya. Dengan hak milik ini manusia menjadi makhluk ekonomi untuk memiliki apa saja yang diinginkan.¹⁹

3. Ekonomi Politik dan Konflik

Basis semua proses akumulasi primitif adalah pengusiran/pencerabutan petani dari tanahnya. Mekanismenya bermacam-macam, masing-masing tempat tidak sama urutan-urutan dan tahapanya. Kalau di Inggris, contoh yang digunakan Marx dalam DasKapital, proses akumulasi primitif ini ditunaikan dengan cara memagari *the common* yang pada awalnya bisa diakses pemanfaatanya oleh siapa

¹⁹Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 31

saja. Para petani kecil diusir dan kemudian tanah tersebut dijadikan ladang penggembalaan domba. Proses ini hampir berlangsung 400 tahun sejak akhir abad 14. Mereka yang tidak memiliki apa-apa lagi ini kemudian menjadi tentara cadangan industri yang kala itu baru berkembang. Awalnya mereka tidak bisa langsung beradaptasi dengan industri yang menuntut keterampilan dan kedisiplinan tertentu, mereka lebih memilih menjadi gelandangan, pengemis, perampok, dan lain-lain.²⁰ Dalam sejarah akumulasi primitif yang dijelaskan Marx, semuanya tentang perjuangan dengan kekerasan melawan pengusiran paksa dan perampasan. Gerakan-gerakan perlawanan ditekan secara brutal. Pada abad 17 dan 18, bisa dikatakan, berbagai macam bentuk perjuangan kelas adalah dari mereka yang menolak dan melawan perampasan bukan sekedar menolak eksploitasi di tempat kerja. Begitu juga yang bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia sekarang.²¹

Dalam menjelaskan hal ini terutama tentang kontinuitas akumulasi primitif Massimo de Angelis menggunakan konsep Karl Polanyi yaitu *Double movement*. Ada gerakan historis pasar di satu sisi, gerakan yang secara inheren tidak punya batasan dan dengan demikian mengancam eksistensi dasar masyarakat. Sedangkan disisi lain, ada masyarakat yang mempertahankan diri dan membuat institusi untuk melindungi mereka. Akumulasi primitif, dan juga akumulasi kapital, meleakkan modal sebagai kekuatan sosial yang harus mengatasi batas-batas yang menghalangi. Tetapi sementara akumulasi, batas-batasnya adalah

²¹ Amin Tohari dkk, *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*. (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011), h. 98-99.

kuantitatif, sedangkan akumulasi primitif batas-batasnya adalah kualitatif. Ada dua tipe *limits* yang harus diatasi oleh modal yaitu:

a. *The Limits of Frontier*

adalah batasan yang membelah wilayah yang sudah dikolonisasi dan wilayah yang belum dan bisa dikolonisasi. Ini adalah identifikasi ruang sosial yang relatif masih belum dikolonisasi oleh relasi produksi kapitalis. Identifikasi ruang seperti ini berujung pada akumulasi primitif, dengan cara menjadikan ruang ini sebagai horizon bagi kebijakan dan tindakan yang memisahkan manusia dari sarana penghidupan mereka.

b. *The Limits as Political Recomposition*

adalah limit yang diidentifikasi oleh kekutan sosial yang melawan modal. Cara yang dilakukan gerakan yang membatasi/mengganggu proses produksi kapitalis ini adalah dengan membangun pertahanan sosial terhadap dorongan tak berujung komodifikasi dan akumulasi, dengan cara membuat ruang yang tidak terkoneksi dengan logika pasar. Sehingga kapital dihadapkan dengan kebutuhan dan problem strategis untuk membongkar penghalang ini.

Kapital *encloses*, perlawanan, penolakan yang sering terjadi di seputar masalah sumberdaya alam yang dilancarkan oleh masyarakat, dan sering kali berbentuk konflik. Konflik ini bisa dipandang sebagai pertarungan di garis batas antara pasar yang melakukan perluasan cengkraman dengan kekuatan rakyat

dalam mempertahankan ruang hidup yang selama ini relatif belum terpasarkan. Dan perlawanan atau penolakan itu sebenarnya adalah *counter-enclosure*.²²



²²Amin Tohari dkk, *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*. (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011), h. 99-100.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dapat di anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.²³ Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang akan di bicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan seperti persoalan Ekonomi Politik Terhadap Kehadiran PT Sumbawa Timur Mining yang dilakukan oleh subyek penelitian menghasikan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang lebih tahu, dan perilaku serta objek yang di amati.

Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kec. Parado Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, penulis memilih Kecamatan Parado sebagai lokasi penelitian di karenakan

²³ Lexi J. Mleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. XXXII; Bandung: Rosdikarya 2014), h. 26.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 20.

Kecamatan Parado merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) sehingga melahirkan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bima untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) nomor 188 tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan, Penulis merasa akan mampu mendapatkan data-data yang valid tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima terhadap eksploitasi pertambangan yang melahirkan respon masyarakat dan respon itu berujung pada konflik.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 3 Mei sampai 20 Juni 2017 (selama 1 bulan 17 hari).

C. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa seobjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang di butuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang kongkrit.

Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan, yakni pengambilan data secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti, terdiri dari unsur tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh secara tidak langsung atau penunjang apabila dibutuhkan. Data ini berfungsi untuk menghindari data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian dan menggunakan hasil temuan di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi dan literatur, baik berupa laporan penelitian, artikel, maupun dokumen-dokumen, baik bersumber dari buku-buku, artikel lain yang memiliki relevansi dengan substansi penelitian. Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian. Dan menguatkan temuan di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi (*interview*).

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian²⁵ yang diamati pada masyarakat Kecamatan Parado Kab. Bima.

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan yang merupakan lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Cet.XIV ; Jakarta:Rienaka Cipta, 2010), h. 21.

umum tentang lokasi penelitian dan kondisi demografisnya serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁶ Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).²⁷

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.²⁸

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data secara selektif yang menggunakan dokumen-dokumen atau hasil penelitian yang telah tersedia pada bahan atau instansi. Sehubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.²⁹

Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data dalam rangka menganalisis masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan data dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima dan data lain yang diperlukan dalam penulisan ini.

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, h. 58.

²⁷ Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

²⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UMS Press, 2004), h. 47.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Cet.XIV ; Jakarta:Rienaka Cipta, 2010), h. 21.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang di gunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Oleh karena jenis penelitian ini adalah kualitatif maka instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pada tipe penelitian seperti ini menurut Usman, peneliti adalah instrumen kunci (*key instrumen*) yang harus terjun sendiri secara aktif dalam melakukan wawancara.³⁰ Alat bantu yang digunakan adalah *camera handphone*, pedoman wawancara dan *notebook*.

a. Camera handphone

Camera adalah alat yang digunakan oleh penulis untuk mendokumentasikan setiap proses wawancara dengan informan serta fenomena sosial lainnya yang penulis jumpai.

b. Perekam *handphone*

Alat rekaman (*recording*) adalah alat bantu yang digunakan oleh penulis untuk mendokumentasikan setiap setiap wawancara dengan informan.

c. Pedoman wawancara dan *notebook*

Pedoman wawancara (*interview guide*) adalah alat bantu dibuat dalam bentuk pelayan mencakup masalah-masalah yang akan diteliti, guna untuk menggali informasi yang telah terjadi melalui melalui informan. Sedangkan *notebook* digunakan untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara.

³⁰ Lihat Husai Ahmad dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 81.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data menurut Huberman dan Miles sebagaimana diikuti oleh Bugin menjelaskan bahwa teknis analisis data ini dikenal dengan istilah tekni pengolahan data interaktif. Cara kerja analisis data ini dimulai dari penyajian data, pengorganisasian data, koleksi data dan mengambil kesimpulan.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kategori, menyusun ke dalam pola, selanjutnya memilih mana data yang penting dan yang akan dianalisa, kemudian membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.³¹

Dalam menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai literatur maupun sumber pada pada objek penelitian di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian data tersebut menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka digunakan teknik penelitian dan analisis data-data tersebut tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang dianggap relevan dn penting yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Sedangkan yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka datanya

³¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke dalam Arah Penguasa Model Aplikasi* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205.

dibuang. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.

2. Display Data

Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah dalam bentuk naratif (pengungkapan secara tertulis).³² Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendiskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi Data

Data yang dipolakan, kemudian difokuskan dan di susun secara sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induktif, data tersebut disimpulkan.³³ Kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dan karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan dengan memasukan dalam tabel

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 249.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 99.

persentase, sedangkan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah uraian dari tabel-tabel persentase.³⁴

G. Pengujian Keabsahan Data

Proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan di lapangan. Cara peneliti dalam proses ini adalah dengan triangulasi. Dalam penelitian, ada beberapa hal yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode,³⁵ dan triangulasi waktu.³⁶

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang),³⁷ yang diperoleh melalui beberapa sumber³⁸ mengecek adalah melakukan wawancara ulang kepada kedua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan, sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi lainnya. Adapun triangulasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya; dan 2) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya pendekatan dari perbandingan, untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

Triangulasi teknik/metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, (2008), h. 49.

³⁵ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 165.

³⁶ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 273.

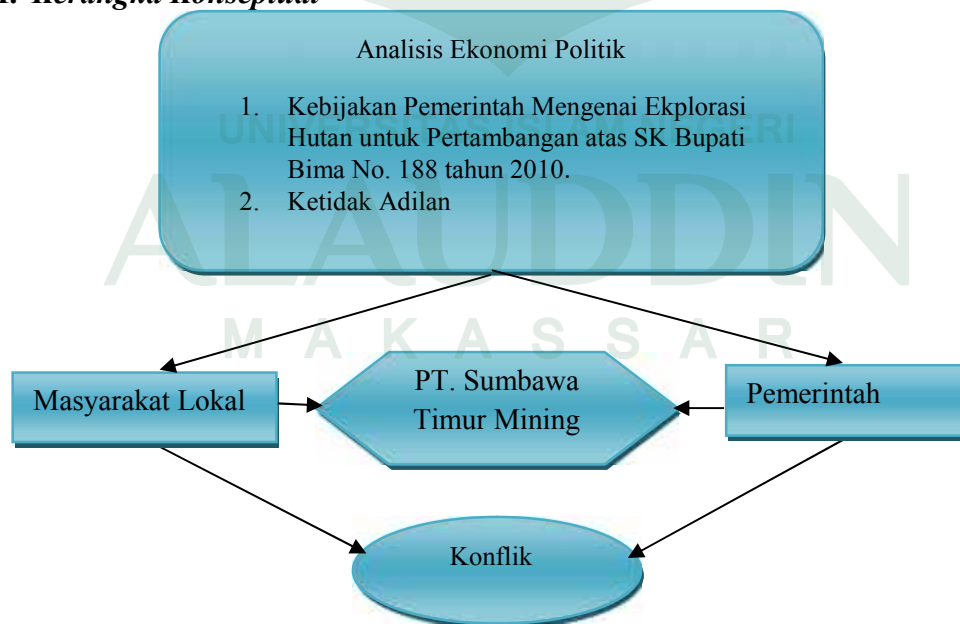
³⁷ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 274.

³⁸ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 274.

koesioner. Bila tiga teknik/metode pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.³⁹

Selanjutnya triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data (*validityas interbal*). Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibilitas. Dalam rangka pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁴⁰

H. Kerangka Konseptual



³⁹ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 274.

⁴⁰ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 274

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bima dan Kecamatan Parado

1. Profil Kabupaten Bima

a. Letak Geografi Kabupaten Bima

Daerah Bima terdiri dari dua daerah otonom yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur pulau Sumbawa tepatnya pada posisi 70-30 lintang selatan dan 117-30 bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Dompu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Sape.

Luas wilayah Kabupaten Bima adalah 437,465 Ha atau 4. 394, 38 Km² atau sama dengan 22, 10% dari Wilayah Propinsi NTB, terdiri dari 18 Kecamatan, 168 Desa, dan 419 Dusun.

Berikut ini terlihat dalam bentuk tabel penjelasan mengenai luas wilayah per kecamatan yang didapatkan oleh penulis datanya dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima Kota Bima NTB. Adapun data luas wilayah per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel. I
Data Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Ha	Km ²
1	Monta	24. 500	245,00
2	Parado	24. 381	243,81
3	Madapangga	23. 758	237,58
4	Woha	10. 557	105,57
5	Belo	5. 831	58,31
6	Langgudu	32. 294	322,94
7	Wawo	13. 500	135,99
8	Sape	23. 212	232,12
9	Lambu	40. 425	404,25
10	Wera	4. 532	465,32
11	Ambalawi	18 .065	180,65
12	Donggo	11. 337	113,37
13	Sanggar	47. 789	477,89
14	Tambora	42. 782	427,82
15	Bolo	6. 693	66,93
16	Soromandi	35. 212	352,12
17	Lambitu	6. 269	62,96
18	Palibelo	5. 803	58,03
	Jumlah	438, 940	4. 389' 400

Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 km². Kota Bima terletak di pulau Sumbawa bagian Timur pada posisi 180-41,00 Bujur Timur dan 830,00 Lintang Selatan dengan batas wilayah Sebelah Utara Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebelah Timur Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, sebelah Selatan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dan sebelah Barat Teluk Bima. Luas wilayah Kota Bima adalah 222, 25 km² yang terbagi dalam lima Kecamatan yaitu, Kecamatan Rasa Na,e Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasa Na,e Timur Dan Kecamatan Raba. Kota Bima terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.⁴¹

b. Kondisi Tipografi

Kabupaten Bima beriklim tropis dengan musim hujan yang relatif pendek yakni dari bulan Desember-Maret. Dikelilingi oleh pegunungan yang terdiri dari Gunung Tambora di Kecamatan Tambora, Gunung Sangiang di Kecamatan Wera, Gunung Maria di Kecamatan Wawo dan Gunung Soromandi di Kecamatan Donggo. Gunung Soromandi merupakan Gunung yang tertinggi dengan ketinggian mencapai 477.5 m.

Secara tipografi Wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi berstruktur pegunungan, sementara sisanya (30%) adalah dataran rendah. Sekitar 14% dari propinsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan dengan pertumbuhan

⁴¹M. Hilir Ismail dan Alan Malingi, *Sultan Abdul Kahir 11 (Sultan Bima Ke XIV)* (Mataram: Mahani Persada, 2010), h. 7-8.

penduduk kedepan akan menyebabkan daya dukun lahan semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dan sektor pertanian tradisional ke wilayah wirausahaan dan sektor industri kecil serta perdagangan. Dilihat dari ketinggian permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan Sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian 5 m dari permukaan laut.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Kondisi Sosial

Berdasarkan data pusat Statistik Kabupaten Bima tahun 2016, penduduk Kabupaten Bima berjumlah 473.890 jiwa, terdiri dari laki-laki 235.917 jiwa dan perempuan 237.973 jiwa. Penduduk Kabupaten Bima hampir 99% merupakan pemeluk agama islam dengan jumlah Masjid 420 buah, Langgar 344 buah, dan Mushollah 139, Gereja Protestan 3 buah, Gereja Katolik 3 buah dan Pure 3 buah. Selain itu juga terdapat sarana pembinaan agama seperti TPQ sebanyak 372 buah dengan jumlah santri 20.238 orang. Lembaga dakwah 20, madrasah 86 buah dengan jumlah siswa 23.450, penyuluh agama 210 orang dan tokoh agama sebanyak 493 orang.⁴²

2. Kondisi Ekonomi

Kabupaten Bima memiliki 1 (satu) buah pelabuhan ASDP lintas penyeberangan di Kecamatan Sape Menuju Pulau Komodo, Labuan Bajo dan Ende Nusa Tenggara Timur serta 12 (dua belas) pelabuhan lokal yang ditetapkan

⁴²*Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima Tahun 2016.*

dengan keputusan Bupati Bima Nomor: 57 Tahun 2006. Pelabuhan regional tersebut berada di Kecamatan yang hingga saat ini belum dapat disadari oleh kapal-kapal yang bertonase besar karena dangkal. Selain itu masih terdapat pula satu pelabuhan khusus untuk mengekspor hasil tambang mangan yang letaknya di Desa Laju, Kecamatan Langgudu. Pelayanan jasa angkutan udara dilaksanakan melalui Bandar Udara M. Salahuddin Bima yang merupakan satu-satunya bandar udara yang ada di wilayah Kabupaten Bima Dan Kabupaten Dompu. Bandar Udara M. Salahuddin Bima kini melayani pesawat jenis Fokker 26. di antaranya pesawat Merpati, Garuda, Lion Air, Wings Air, Susi Air. Rute yang dilalui yakni penerbangan dari Bima menuju Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta, Makassar dan Selayar.

Struktur perekonomian suatu daerah mencerminkan kekuatan sekaligus ketergantungan suatu daerah terhadap suatu sektor. Struktur perekonomian Kabupaten Bima masih didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki peranan 50,14%, sektor yang paling kecil menghasilkan nilai tambah adalah sektor Listrik, gas dan air bersih (LGA). Sektor industri yang diharapkan menggantikan posisi sektor pertanian untuk menuju proses industrialisasi, belum menunjukkan hasil yang diharapkan, peranan sektor industri baru mencapai 2,24% dari perekonomian Kabupaten Bima.

Komoditas utama pertanian selain Padi dan Palawija seperti Kadelai, Jagung, Kacang Tanah dan Ubi, juga memiliki komoditas unggulan yang menjadi andalan hortikultura sebagai penghasil Bawang Merah dan Bawang Putih. Luas area untuk budidaya Bawang Merah mencakup sekitar 13.683 Ha dan baru

dimanfaatkan 49% dari seluruh potensi dengan total produksi per tahun mencapai 66.076 ton.

Bima dikenal sebagai daerah penghasil bawang dengan kualitas terbaik Bawang *Keta Monca* (Bawang Merah) saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya telah memberikan sumbangan signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain yang besar, Bawang *Keta Monca* terkenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri serta banyak diminati oleh konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

Selain itu, mayoritas masyarakat Kabupaten Bima banyak menggantungkan kehidupan dari perkebunan. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan meliputi 18 jenis, yang terdiri dari 11 jenis tanaman tumbuhan dan 7 jenis tanaman musiman meliputi tanaman Jambu Mente, Kopi, Kelapa, Kemiri, Kapas, Wijen dan Empon-Empon. Khusus pengembangan Jambu Mente diupayakan melalui program kimbun dengan memanfaatkan lahan kering di Kecamatan Donggo, Kecamatan Belo, dan Kecamatan Madapangga. Salah satu komoditas perkebunan unggulan yang dimiliki Kabupaten Bima adalah Kopi Tambora yang potensi mengembangkannya cukup luas. Sekitar 10.085,15 Ha lahan perkebunan di Kecamatan Tambora telah dikembangkan komoditas Kopi, Jambu Mente, Kelapa dan Komoditas lainnya. Khusus pengembangan kebun Kopi Tambora berdasarkan status kepemilikan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu kebun kopi. Eks HGU PT. Bayu Aji Bima Sena dan kebun kopi milik rakyat, dari 381 Ha luas pertanahan kopi di Kecamatan Tambora di kelola oleh eks HGU PT.

Bayu Aji Bima Sena, sedangkan 331 Ha lainnya dikelola personal oleh masyarakat.

d. Potensi kekayaan alam

Bima merupakan daerah dengan sejumlah potensi kekayaan alam yang begitu luas. Potensi teridentifikasi berupa bahan galian berupa emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu menyebar hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Terdapat 14 ijin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebagai penyelesaian dari kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bima sebelumnya. Terdapat sebanyak 14 IUP.

2. Profil Kecamatan Parado

Nama Parado secara etimologis adalah masih menyimpan banyak versi. Ada yang mengatakan, kata Parado merupakan turunan kata Inggris *Paradise* (firdaus, surga). Konon yang memberi nama itu orang Portugis sebagai wujud rasa kagumnya terhadap keindahan alam yang berhawa sejuk dan dingin. Tanah, tempat berbagai macam tanaman bisa tumbuh subur. Abd. Rahman justru berpendapat lain Parado berasal dari *paradoho*. Berasal dari *para* yang bermakna pelataran, dan *doho* yang berarti duduk. Jadi, satu pelataran tempat duduk bersama. Apapun makna asalnya kata tersebut, yang pasti nama itulah yang digunakan hingga kini. Masih diperlukan penelitian kebahasaan (linguistik) yang berlanjut menyingkap nama tersebut.⁴³

a) Wilayah

Wilayah Kecamatan Parado dengan luas 261,29 km² terbagi dalam lima Desa yaitu Desa Parado Rato, Parado Wane, Kanca Kuta dan Lere. Sebagai pusat

⁴³M. Dahlan Abubakar, *K.H. Muhammad Hasan, BA Guru, Tabib dan Misteri Jin* (Cet. I; Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), h. 14.

Pemerintahan Kecamatan Parado yaitu Desa Parado Rato berada pada jarak 52 km dari Ibukota Kabupaten Bima dengan ketinggian 252 m di atas permukaan laut. Di antara 5 desa, Desa Lere merupakan dengan jarak terjauh (+15 km) dari Ibukota Kecamatan.⁴⁴

Batas-batas Kecamatan

Sebelah Utara : Kecamatan Madapangga
 Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
 Sebelah Barat : Kabupaten Dompu
 Sebelah Timur : Kecamatan Monta

Berdasarkan struktur Pemerintahan Desa di Kecamatan Parado, terlihat bahwa masing-masing desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa dan rata-rata setiap desa terdapat 5 orang staf desa. Tingkat pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Parado adalah strata satu sejumlah 3 orang dan SMA berjumlah 2 orang.

Selain itu masing-masing desa membawahi 3 (tiga) hingga 5 (lima) dusun, dimana masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh beberapa ketua RW dan RT.

Berikut ini terlihat dalam bentuk tabel penjelasan mengenai luas wilayah per desa yang didapatkan oleh penulis datanya dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima Kota Bima NTB. Adapun data luas wilayah per desa yang ada di kecamatan Parado adalah sebagai berikut.

⁴⁴Katalog, *Kecamatan Parado dalam angka 2016* (Bima: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2016), h. 2.

Tabel II
Luas Wilayah Perdesa Kecamatan Parado Pada Tahun 2016⁴⁵

No.	Luas Wilayah	Jumlah (Ha)
1	Parado Rato	4.88
2	Parado Wane	86,95
3	Kanca	50,97
4	Kuta	58,83
5	Lere	59,66
	Jumlah	26.129

Sumber: BPS Kabupaten Bima

b) Penduduk

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan Masyarakat Kecamatan Parado Sebanyak 9.282 jiwa terdiri dari laki-laki 4.596 jiwa dari jumlah penduduk yang tercatat sementara perempuan sejumlah 4.686 jiwa dari jumlah yang tercatat

Tabel III
Jumlah Penduduk Kecamatan Parado Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	4.596
2.	Wanita	4.686
	Jumlah	9.282

Sumber: BPS Kabupaten Bima

⁴⁵ Katalog, *Kecamatan Parado dalam angka 2016* (Bima: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2016), h. 9.

Dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi kecamatan, terdapat selisih sebanyak 125 jiwa yang tidak tercatat dalam Survei sekunder. Hal ini mendorong pemerintah kecamatan untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan cek ulang terhadap penyebab terjadinya selisih data penduduk tersebut.⁴⁶

Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya selisih tersebut adalah:

- 1) Banyak warga yang mencari nafkah di luar kecamatan
- 2) Banyak warga kecamatan yang merantau di luar negeri
- 3) Banyak warga yang sudah pindah karena domisili di karenakan
 - a. Sekolah keluar daerah
 - b. Pindah rumah karena pekerjaan
 - c. Banyak penduduk yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat
 - d. Perkawinan keluar desa
- c) Jumlah Sekolah atau Tingkat Pendidikan di Kecamatan Parado

Sejalan dengan pembangunan nasional dan adanya otonomi daerah yang juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik yang menyangkut moral, spritual, rohani maupun yang menyangkut fisik jasmani. Apabila dilihat dari Kecamatan Parado adalah ketaatan dan kepatuhan yang tidak boleh di tawar-tawar. Sehingga dalam praktek pendidikan yang diterapkan orang tua memberikan perhatian yang serius bagi

⁴⁶Katalog, *Kecamatan Parado dalam angka 2016* (Bima: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2016), h. 25.

anak-anaknya, baik itu laki-laki maupun anak perempuan. Untuk melangkah dengan penuh ketaatan dan perhitungan serta tidak mendurhakai orang tua.

Seperti halnya dengan pendidikan yang berlaku secara nasional, maka pendidikan yang ada di Kecamatan Parado terdiri dari pendidikan formal yang berstatus negeri maupun swasta dengan fasilitas pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV
Keadaan Penduduk Kecamatan Parado Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Jenis Atau Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	8
2.	Sekolah Dasar	8
3.	SMP	4
4.	SMAN	1
5.	Madrasa Ibtidaiyah	3
6.	Madrasah Tsanawiyah	3
7.	Madrasah Aliyah	2
	Jumlah	29

Sumber Data: Kantor UPT DIKPORA Kecamatan Parado⁴⁷

Melihat tabel di atas, tampaknya di Kecamatan Parado terdapat 7 jenis pendidikan. Dari segi etnis, adat istiadat di Kecamatan Parado seluruh masyarakat menghormati pendidikan. Karena pendidikan lebih penting di bandingkan dengan tidak berpendidikan, pendidikan menjadi tradisi bagi

⁴⁷Sumber Data: Kantor UPT DIKPORA Kecamatan Parado 2016.

masyarakat kecamatan parado oleh karena itu peningkatan pendidikan pada tahun 2016 sangat signifikan di bandingkan sebelum-sebelumnya, misalnya Madrasah Aliyah Al Mukhlisin pada tahun 2016 siswa yang mendapatkan bidik misi di berbagai kampus di Indonesia sebanyak 29 orang siswa sedangkan di SMAN Parado Sebanyak 6 orang siswa ini adalah hal yang cukup luar biasa sehingga masyarakat parado tambah menghormati mengenai pendidikan seperti yang disampaikan oleh salah yang bernama Salmah mengatakan bahwa:

Kami selaku guru yang mengajar disekolah ini sangat bangga ketika murid-murid kami mendapatkan prestasi selama ini apalagi bisa lolos bidik misi diberbagai kampus yang ada di Indonesia, kami bangga sekali. Mudah-mudahan mereka bisa membaggakan kedua orang tuanya negara dan bangsanya sendiri amin.⁴⁸

Setelah saya melihat dan memperhatikan selama berada dilapangan ternyata yang membuat siswa siswi di Kecamatan Parado bisa mendapatkan bidik misi diluar daerahnya disebabkan karna jaringan internet sudah dipasang diberbagai sekolah-sekolah sehingga mereka dapat menjangkau informasi yang jauh lewat internet berupa pendaftaran masuk diperguruan tinggi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh kampus tersebut.

Jadi tidak diherankan bahwa masyarakat Parado menolak kehadiran pertambangan karena tidak memberikan perekonomian yang stabil untuk masyarakat setempat seperti yang di sampaikan oleh Sekretaris Desa Kuta Akbar Tanjung yang mengatakan bahwa:

Seandainya dinas pertambangan mau tanggung kepada setiap anaknya masyarakat di Kecamatan Parado ini seperti membiayai sekolah, kuliah, dan seluruh kebutuhan pokok masyarakat tentu masyarakat akan menerima kehadiran pertamabangan itu tetapi sosialisasinya tidak ada mereka

⁴⁸Salmah (26 tahun) Guru Al_Mukhlisin Salama Parado Bima, *Wawancara*, di Sekolah Al_Mukhlisin Salama Parado Bima, 19 Mei 2017.

langsung melakukan eksplorasi sama halnya mengambil punya orang tanpa sepengetahuan yang punya makanya masyarakat lebih memilih seperti biasanya tanpa harus memikirkan bantuan dari tambang karna selama ini hampir semua anak masyarakat yang ada di Kecamatan Parado ini sekolahnya dari hasil pendapatan sendiri bukan dari bantuan orang lain.⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kehadiran pertambangan tidak mempunyai kontribusi sama sekali untuk kelangsungan hidup masyarakat, masyarakat lebih memilih seperti cara pengelolaan sumber daya alam yang ada dikelola oleh mereka seperti biasa yang mereka lakukan sebelum kehadiran pertambangan. Dikarenakan masyarakat lebih mendapatkan kenyamanan sebelum adanya pertambangan dibandingkan dengan adanya tambang, masyarakat galau, masyarakat gelisah karna kehadiran pertambangan.

d) Mata Pencaharian

Tabel V
Jumlah Penduduk Kecamatan Parado Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2016.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	270
2	Perkebunan	511
3	Perikanan	256
4	Tanaman	2.116
5	Kehutanan	2.175
6	Hortikultura	333
7	Peternakan	1.168
	Jumlah	6. 829

Sumber: BPS Kabupaten Bima 2016

⁴⁹ Akbar Tanjung (28 tahun) Sekretaris Desa Parado Kuta, *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Kuta, 12 Mei 2017.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian penduduk mempunyai mata pencaharian yang telah disebutkan di atas adalah petani, kebanyakan penduduk di Kecamatan Parado adalah bermata pencaharian sebagai petani, namun ada juga yang mempunyai mata pencaharian seperti: Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, dan lain-lain sebagai sumber penghidupan mereka.

e) Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Parado Sangat Menghormati Lingkungan. Bagi masyarakat parado sumber kehidupan adalah alamnya, bagi mereka alam sangat berarti sehingga harus di jaga baik-baik seperti seorang ibu menjaga anaknya demikianlah kecintaan masyarakat parado kepada lingkungan baik lingkungan sesama manusia maupun lingkungan dengan alam yang mereka kelola dengan baik, menjaga alam sangatlah penting bagi masyarakat kecamatan parado karena itulah masyarakat parado menolak kehadiran pertambangan karena di khawatirkan akan merusak alam dan lingkungan yang ada. Masyarakat Parado Memegang Prinsip yang ada pada Motto Kota dan Kabupaten Bima yaitu: Maja Labo Dahu (malu sama takut) malu ketika berbuat salah dan takut ketika keinginan itu tidak tercapai, masyarakat kecamatan parado di kenal juga sebagai masyarakat yang cukup taat pada agama, lebih mementingkan pembelajaran agama dari pada pembelajaran yang umum. Ketika orang jalan pada malam hari di kecamatan parado akan lebih banyak mendengarkan di berbagai rumah yang ada itu adalah bunyi orang yang mengaji itulah tradisi budaya yang sampai hari ini tetap ada.⁵⁰

⁵⁰Ahmad (63 tahun), Tokoh Masyarakat Parado Rato. *Wawancara* di Kediannya Parado Bima. 12 Mei 2017.

f) Kondisi Sosial Agama

Dalam kehidupan manusia bahwa agama adalah landasan atau pedoman hidup yang paling utama. Oleh karena itu manusia tidak bisa terlepas dari naungan agama yang di anutnya, ketika tidak ada identitas agama maka dapat dikatakan bahwa manusia itu tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas karena tidak memegang pedoman seperti yang di pegang oleh para pemeluk dan penganut agama-agama yang ada seperti yang disampaikan oleh tokoh agama KH.

Muhammad Hasan B,A mengatakan bahwa:

Masyaraka Parado adalah masyarakat yang dikenal relegius dalam kehidupan masyarakat Bima, yaitu masyarakat yang berpegang tegus pada nilai-nilai agama serta adat istiadat, sehingga Parado dalam rentang tahun 60 an menjadi tempat berguru bagi masyarakat yang berasal dari Sape, Ngali, Karumbu dan Masyarakat lainnya di Bima, hal ini didukung oleh keberadaan ulama dan guru yang sebelumnya pernah belajar dan tinggal di Mekkah.⁵¹

Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran nilai, Parado yang dulunya dikenal sebagai tempat bergurunya para guru menjadi tempat yang menjadi sorotan berbagai pihak bahkan sampai pada berita nasional karena konflik yang terjadi. Hal tersebut mengukuhkan Parado sebagai salah satu zona konflik di Kabupaten Bima, telah mengalami pergeseran nilai, terutama pasca terjadi tragedi berdarah yaitu peristiwa penolakan tambang yang berujung penembakan oleh aparat Kepolisian dan Brimob pada tahun 2011.

Isu pertambangan bukan hanya sebagai faktor tunggal terjadi konflik Namun, ada banyak faktor lain sebelum adanya kebijakan tersebut seperti adanya ketimpangan-ketimpangan sosial serta ketidakadilan yang dirasakan oleh

⁵¹KH. Muhammad Hasan (95 tahun), tokoh agama, Bima, Mei 2017.

masyarakat terutama memperoleh kepastian hukum dan kedudukan yang sama dimata hukum, Seperti yang terjadi sekitar tahun 2000-an ke atas Dinas Kehutanan yang di bantu oleh Polisi Hutan (Polhut) melakukan pengejaran terhadap setiap orang yang melakukan penebangan pohon, baik pohon kemiri maupun pohon lainnya untuk keperluan bahan pembangunan tempat tinggal (rumah) mereka, atau membuka lahan baru tanpa izin dari pemerintah. Sehingga ada beberapa masyarakat yang dipenjara karena persoalan tersebut. Sementara dalam kasus-kasus antar pemuda, pemuda Parado Rato merasa selalu di anak tirikan dalam mendapatkan keadilan, hal inilah yang melahirkan mosi tidak percaya masyarakat khususnya masyarakat Parado Rato terhadap kinerja dan keberadaan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Parado. Masyarakat Parado adalah masyarakat yang patuh terhadap tokoh-tokoh dan ulama, meskipun menghadapi ketimpangan-ketimpangan, selalu di upayakan yang secara tidak langsung menggambarkan karakter masyarakatnya yang sabar dan taat pada ulama dan para tokoh lainnya.

g) Kondisi Sosial Ekonomi

Sarana pendukung roda perekonomian yang ada di Kecamatan Parado antara lain 1 pasar umum, 2 Badan Usaha Unit Desa, Koperasi Unit Desa, dan 233 kios/warung. Pak Ahmad Mengatakan Bahwa:

Masyarakat Kecamatan Parado pada umumnya adalah petani (padi, kedelai, jagung dan kacang). Selain itu, sebagian masyarakatnya berprofesi sambilan sebagai peternak Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Nelayan dan Perkebunan. Parado memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dihasilkan di antaranya: Sarang Burung Walet, Lebah Madu, Durian, Vanili, Kemiri, Rambutan, Salak, Kelapa dan rempah-rempah. Selain itu, Parado memiliki sumber daya alam berupa bahan galian seperti emas dan tembaga, hal itulah yang menjadi landasan

dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima melalui SK 188 tahun 2010.⁵²

Ketika dilihat dari penjelasan yang disampaikan oleh pak Ahmad diatas menunjukan bahwa hasil kekayaan alam yang ada di Kecamatan Parado ini cukup luar biasa banyak, karna berbagai macam hasil alamnya tentu tidak mengherankan lagi bahwa hal ini mengundang perhatian dari kalangan luar seperti salah satunya sumber daya alam yang ada diperut bumi paradise ini adalah pertambangan emas, siapa yang tidak tertarik sama emas daun kelor saja orang tertarik apalagi emas kan begitu.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Kebijakan Pemerintah dalam Memberi Ijin Berdirinya PT.

Sumbawa Timur Mining

Kepulaun Indonesia, terkenal sebagai kantong ajaib, tempat bersemayam jutaan ton kekayaan alam, mulai dari kekayaan alam yang diatas tanah (hutan dan segala isinya, tanah yang subur pemandangan yang indah, air yang melimpah, musim tropis), maupun kekayaan alam yang berada di bawah bumi seperti bermacam galian mineral, gas, dan minyak bumi. Kekayaan alam inilah yang membuat betah bangsa-bangsa Eropa (terutama Belanda) untuk tinggal dan menetap dalam waktu yang sangat lama di Indonesia.⁵³

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai kesejahteraan sosial bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

⁵²Ahmad (63 tahun), Tokoh Masyarakat Parado Rato. *Wawancara* di Kediannya Parado Bima. 12 Mei 2017.

⁵³Amin Tohari dkk, *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*. (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011), h. 100.

besar kemakmuran rakyat.⁵⁴ Pada pasal inilah pemerintah Kabupaten Bima berpedoman untuk memberikan ijin pada perusahaan pertambangan PT. Sumbawa Timur Mining yang merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan berkedudukan di Jakarta Barat sebagai mana termaktub dalam Akta tertanggal 6 februari 1998 No.19 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 13 Februari 1998 No. C2-847.HT.01.01.Th.98.

PT Sumbawa Timur Mining adalah sebuah perusahaan yang sangat besar seperti yang disampaikan oleh Pak Akbar Tanjung mengatakan bahwa:

PT Sumbawa Timur Mining yang melakukan eksplorasi di Kecamatan Parado adalah salah satu perusahaan terbesar yang memegang kontra karya Izin pertambangan Tahun 1998, setara dengan Nyumon, Freepot.⁵⁵

Perusahaan ini melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan termasuk eksplorasi, pengolahan, dan penjualan emas dan mineral turunan lainnya. Saat ini PT. Sumbawa Timur Mining adalah pemegang kontra karya (KK) mineral berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.B.53/Pres/I/1998 tertanggal 19 januari 1998.⁵⁶ Pengelolaan dan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) telah dibangun melalui semangat UUD 1945 Pasal 3 dengan tujuan utama adalah untuk sebesar- besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Amanat UUD 1945

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (Cet. V; Jakarta: Kepeneritaan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2005),h. 13.

⁵⁵ Akbar Tanjung (28 tahun) Sekretaris Desa Parado Kuta, *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Kuta, 12 Mei 2017.

⁵⁶Muhammad Nawir Messi, *Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Pengambilalihan Akuisisi Saham Perusahaan Easyern Star Resources Pty Ltd Oleh Perusahaan Vale Austria Holdings GmbH*. (Jakarta: Versi Publik, 2012), h. 3.

ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni UU No 1 Tahun 1967 tentang pokok pertambangan mineral dan batubara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pertambangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam era reformasi sekarang ini Pemerintah Daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan. Transfer sebagian kekuasaan, dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal, dilakukan dalam kerangka memudahkan pemerintah merespon segala kebutuhan rakyat di tingkat lokal.

Transfer kekuasaan sebenarnya bagus dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Fry Hari mengatakan bahwa:

Sebenarnya sah-sah saja pemerintah Kabupaten Bima mengeluarkan surat keputusan eksplorasi pertambangan karna Presiden Indonesia memberikan kebebasan mengenai otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan itu harus dilihat baik-baik apakah kebijakan yang dikeluarkan bisa memberikan kesejahteraan dan ketentraman untuk masyarakat atau tidak.⁵⁸

Tetapi yang terjadi justru pemerintah lokal seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Bima memanfaatkan wewenang tersebut

⁵⁷Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁸Fry Hari Fathurrahman (26 tahun), Sekretaris Desa Parado Rato, *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Rato, 09 Mei 2017.

dengan mengeluarkan begitu banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas keinginan dan tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan pemberian hak atau kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi, keinginan masyarakat di daerah untuk kemajuannya bisa terealisasi dengan cepat dan tepat karena diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dengan melibatkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Secara Konstitusional tetap berada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu poin penting dalam penerapan azas desentralisasi di Indonesia adalah kewajiban daerah untuk membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) untuk digunakan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tidak terkecuali di bidang pertambangan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁹ Di dalam Undang-Undang tersebut telah mengatakan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Daerah tentang Pertambangan yang terdapat dalam pasal 8

⁵⁹Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ayat 1 poin (a). Keberhasilan pembangunan di suatu daerah utamanya tergantung pada keberhasilan program pembangunan daerah yang dijalankan dengan Peraturan-Peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah-daerah tersebut. Menipisnya jurang antara kaya dan miskin adalah tolak ukur terbaik dari keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah sebagai bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap kehidupan masyarakat dirasa sebagai suatu hal mutlak. Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memaksimalkan setiap bidang yang dapat menjadi sasaran pungutan pajak salah satunya bidang Pertambangan,

Kabupaten Bima memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya Alam, bahan galian berupa Emas, mangan, tembaga dan pasir besi. Potensi itu menyebar hampir di seluruh Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Potensi ini tentunya tidak disia-siakan oleh pemerintah daerah Bima untuk menarik investor guna mengeksplorasi potensi tambang tersebut. Eksplorasi tambang di Bima digadang-gadang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bima, membuka lapangan kerja bagi tenaga pengangguran, dan tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bima. Berdasarkan tujuan tersebut, Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST Mengeluarkan beberapa Izin Usaha Penambangan untuk mengeksplorasi potensi tambang yang ada di Bima, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmadin mengatakan bahwa:

Bupati Bima H. Feri Zulkarnain ST mengeluarkan beberapa ijin usaha pertambangan di Kabupaten Bima dengan cara menerbitkan Surat Keputusan N0. 188/2010, Surat Keputusan itu ditanda tangani pada tahun

2010 saat beliau menjabat sebagai Bupati Bima, jadi rujukannya beliau ada pada kontra karya masa Suharto Tahun 1998.⁶⁰

Adapun izin usaha pertambangan di Kabupaten Bima tersebut di antaranya:

1. PT. Mineral Nusantara Citra Persada dengan IUP eksplorasi nomor 188.45/346/004/2010, masa berlaku dari tanggal 28 April 2010 hingga 1 Mei 2015, dengan luas wilayah, garapan 14.403 hektare. Meliputi wilayah Kecamatan Madapangga yaitu Desa Campa, Tonda, Mpuri, Rade, Woro. Kemudian Kecamatan Bolo di Desa Tumpu dan Kecamatan Woha di Desa Keli dan Risa. Bahan galian jenis tembaga.
2. PT Sumbawa Timur Mining dengan IUP Eksplorasi nomor 188.45/348/004/2010, dengan luas wilayah 22.000 hektare. Berada di Kecamatan Parado, meliputi Desa Parado Rato, Parado Wane, Parado Kanca, Kuta Parado, Parado Lere. Dengan jenis bahan galian Emas
3. PT. Indomineral Citra Persada, IUP Eksplorasi Tembaga nomor 188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare, berada di Kecamatan Lambu, meliputi Desa Mangge, Lanta dan Simpasai, serta Kecamatan Langgudu pada desa Waworada.
4. PT. Indomining Karya Buana mengantongi tujuh IUP Operasi Produksi, dengan jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi. Untuk mangan berada di wilayah desa Waworada, Karumbu, Rupe Kecamatan Langgudu, Desa Mpuri, Tonda dan Campa, Kecamatan Madapangga, Desa Pela, Kecamatan Monta, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, Desa Sambori,

⁶⁰ Ahmadin, (30 tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Kediannya, Parado Bima 12 Mei 2017.

Kecamatan Lambitu, Desa Kombo, Kambilo, Maria dan Ntori, Kecamatan Wawo.

5. Sedangkan untuk bahan galian pasir besi diberikan PT Indomining Karya Buana mengantongi IUP di Desa Oi Tui, Tawali dan Tengge, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Nipa, Nangaraba dan Tololai, Kecamatan Ambalawi.
6. PT. Jagad Mahesa Karya mengantongi IUP Operasi Produksi bahan galian pasir besi dengan SK Nomor 188.45/345/004/2010 untuk wilayah Desa Sangiang, Oi Tui, Tadewa, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi.
7. Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP eksplorasi pada PT Bima Putera Minerals dengan SK Nomor 188.45/344/004/2010, pada wilayah Desa Maria, Pesa dan Kambilo, Kecamatan Wawo.
8. Kemudian untuk biji besi dikeluarkan IUP Eksplorasi 188.45/356/004/2010 pada PT Bima Feroindo, pada wilayah Desa Karampi, Waduruka, Kecamatan Langgudu. dan
9. Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP eksplorasi pada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dengan SK Nomor 188.45/346/004/2010, pada wilayah Kecamatan Lambu.⁶¹

⁶¹Sumber Data: Arsip Pegawai Kecamatan Parado di Ambil dari Pegawai Camat Parado Kabupaten Bima pada saat Peneliti Melakukan Wawancara di Kantor Camat. Selasa Taggal 25 Mei 2017.

Pak Baharudin Camat Kecamatan Parado menilai keputusan Bupati Bima bahwa:

Sebenarnya niat Bupati Bima bapak Fery Zulkarnain ST ini sah-sah saja karena juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"⁶²

Dalam pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶³

Adapun respon positif terhadap kebijakan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Camat Parado Baharudin S.Sos mengatakan bahwa:

Tujuan pemerintah sebenarnya bagus dan juga baik untuk masyarakat, kalau hadirnya pertambang ada lowongan kerja yang banyak sehingga masyarakat

⁶²Baharudin (55 tahun), Camat Parado Bima, *Wawancara*, di Kantor Camat Parado, 09 Mei 2017.

⁶³Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 2

bisa ikut terjun bekerja di perusahaan tersebut. Menurut kacamata kita ketika adanya tambang tentu semuanya akan bagus seperti pembangunan jalan dan lain-lain, akan tetapi masyarakat Parado lebih melihat pada wilayah kerusakan alamnya daripada manfaat yang dihasilkan oleh pertambangan tersebut⁶⁴

a. Kebijakan Pemerintah yang kurang terbuka

Tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan Pemerintah (baik itu Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten) dinilai tidak transparan ataupun terkesan tertutup terhadap masyarakat, terkait rencana maupun kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan. Sebagaimana dalam kasus SK 188, pemerintah langsung saja menetapkan dan mengeluarkan surat ijin pertambangan tersebut, tanpa menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat, luas wilayah yang dijadikan area pertambangan, mengenai ganti rugi terhadap tanah kepada pemegang hak atas tanah, serta mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan nantinya dan bagaimana AMDAL-nya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Pardimin salah seorang aktivis Mahasiswa yang menjadi Informan penelitian ini, dia mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya kejadian di Kecamatan Parado pada tahun 2011 itu berawal dari keberadaan pemerintah yang tidak pernah melakukan tahap tawar menawar atau sosialisasi terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bima langsung saja menandatangani SK 188 itu, tanpa adanya tahap sosialisasi dan keterbukaan terhadap masyarakat sebelumnya mengenai kebijakan tersebut.⁶⁵

⁶⁴Baharudin (55 tahun), Camat Parado Bima, *Wawancara*, di Kantor Camat Parado, 09 Mei 2017.

⁶⁵Pardimin, (26 tahun), Aktivis Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Parado Bima (IPPERMA-PARBI) Mataram, *Wawancara* di Kediannya, Parado Bima 22 Mei 2017.

Saudara Pardimin secara pribadi menilai bahwa terdapat beberapa hal yang terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah mengenai seperti apa perjanjian dan kesepakatannya dengan pihak pertambangan tersebut, sehingga hal itu wajar saja dilakukan oleh pemerintah. Sebab menurutnya apabila pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikitpun, maka kemungkinan besar masyarakat pasti akan menolaknya. Sehingga untuk memuluskan rencananya, pemerintah mengambil langkah untuk tetap mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Usaha pertambangan tersebut kepada PT Sumbawa Timur Mining, meski tanpa sepengetahuan masyarakat sebelumnya.

b. Kebijakan Tanpa Studi Kelayakan

Penentuan kebijakan sangatlah penting bagi seorang pemimpin dalam sebuah kepemimpinan. Namun, dalam penentuan kebijakan hendaklah seorang pemimpin mampu melihat serta memperhatikan kondisi dan keadaan lingkungan masyarakatnya, pemimpin harus senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan setiap anggota masyarakatnya, tidak sekedar memperturutkan keinginan pribadi maupun kepentingan kelompoknya saja. Kebijakan yang diambil haruslah menyangkut kebaikan bersama dan harus sesuai dengan Undang-undang atau aturan yang menyangkut hal tersebut.⁶⁶ Dari pemerintah daerah berkeinginan agar potensi kekayaan alam yang ada di wilayahnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, namun sebelum penentuan Ijin Usaha

⁶⁶Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. XXXVII; Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004) h. 94.

Pertambangan tersebut dikeluarkan pemerintah tidak melibatkan masyarakat setempat terutama masyarakat yang memiliki hak atas tanah, selain itu pengkajian terhadap kondisi Sosio-geografis merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebelum kebijakan itu benar-benar diputuskan. Setelah dicermati ternyata SK 188 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian dengan nilai-nilai pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia khususnya UU No. 4 tahun 2009. Seperti yang tercantum dalam lampiran pernyataan sikap Team 9, yang penulis peroleh dari Fry Hari, menjelaskan: Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 bahwa batas dan luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral, logam dan batubara ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan SK Bupati tersebut tidak berdasarkan isi pasal tersebut yaitu tidak menentukan atau melampirkan data Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.⁶⁷

Selanjutnya, dalam pasal 18 berbunyi kriteria untuk menentukan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam suatu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah sebagai berikut: letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan batubara dan tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan sebelum mengeluarkan SK 188 tersebut pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penetapan WIUP berdasarkan kriteria-kriteria diatas. Masyarakat menganggap berdasarkan kriteria diatas

⁶⁷ Fry Hari Fathurrahman (26 tahun), Sekretaris Desa Parado Rato, *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Rato, 09 Mei 2017.

pemerintah harus melakukan pengkajian dan peninjauan kembali terhadap WIUP yang dimaksud.

SK 188 tersebut juga dinilai tidak mencantumkan atau memuat ketentuan wajib yang diatur dalam UU No. 4 tahun 2009 pasal 39 ayat 1 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi. Seperti dalam ayat 1 huruf (a) berbunyi, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: Nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak dan kewajiban pemegang UIP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis saham yang diberikan, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian masalah perelisisan, iuran tetap dan iuran eksplorasi dan AMDAL.⁶⁸

Pasal 135 dalam UU No. 4 Tahun 2009 juga berbunyi pemegang UIP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah, namun PT. Sumbawa Timur Mining (STM) didalam melaksanakan kegiatan tahap eksplorasi tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah dalam hal ini Masyarakat setempat.

Peraturan Perundang-undangan juga memuat sangsi-sangsi bagi setiap orang yang mengeluarkan UIP yang bertentangan dengan Undang-undang dan menyalah gunakan kewenangannya, sebagaimana yang dimuat dalam pasal 165 yang berbunyi, setiap orang yang mengeluarkan UIP, PR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya

⁶⁸ Lampiran Pernyataan Sikap Team 9.

diberi sangi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda RP. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).⁶⁹

2. Respon Masyarakat Terhadap Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining

Kehadiran tambang di Kecamatan Parado membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Sehingga perusahaan pertambangan PT Sumbawa Timur Mining memberikan dampak positif terhadap kesempatan bekerja masyarakat pada sektor pertambangan, akan tetapi dalam skala yang sangat kecil karna masyarakat yang bekerja di PT Sumbawa Timur Mining hanya beberapa orang saja dari Kecamatan Parado. Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap perusahaan pertambangan cenderung tidak memiliki dampak yang positif, masyarakat menganggap bahwa kehadiran perusahaan pertambangan tidak memberikan pengaruh untuk peluang kerja bagi masyarakat Kecamatan Parado. Walaupun tidak ada perusahaan tambang di Kecamatan Parado, masyarakat akan tetap berusaha sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap masyarakat dan potensi daerah Kecamatan Parado, karena jauh sebelum perusahaan pertambangan masuk, masyarakat Kecamatan Parado mempunyai Pekerjaan yang menjanjikan untuk kelangsungan hidupnya dengan bertani, berdagang, berternak, di daerah ini.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam peneliti sama Pak Fry Hari mengatakan bahwa:

Kehadiran pertambangan tidak memberi peluang untuk bekerja, justru perusahaan pertambangan mematikan bekerja masyarakat di sektor pertanian, hal inilah yang mempengaruhi penurunan ekonomi masyarakat. Masyarakat melihat bahwa kehadiran pertambangan ini hanya berdampak

⁶⁹ Lampiran Pernyataan Sikap Team 9.

positif pada pemegang kekuasaan elit lokal, perusahaan pertambangan berkongkalikong dengan pemerintah Kabupaten sehingga atas izin pemerintah Kabupaten inilah yang membuat eksploitasi itu bisa hadir di Kecamatan Parado dan Pemerintah Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Keputusan eksploitasi pertambangan di Kecamatan Parado pada tahun 2010.⁷⁰

Debu dan asap tebal yang mengepul ke udara tak mengenal waktu, itu adalah akibat langsung dari aktivitas perusahaan tambang yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Parado. Tanaman perkebunan dan persawahan, Peternakan, sumur-sumur dan sumber mata air yang menjadi andalan masyarakat selama ini mengalami masalah. Demikian pula *Income generating* dan ancaman degradasi lingkungan menjadi masalah serius bagi masyarakat Kecamatan Parado dan sekitarnya.

Kegiatan eksplorasi oleh PT. Sumbawa Timur Mining, di area Kecamatan Parado Kab.Bima memang cenderung mengakibatkan reaksi dari Masyarakat sekitar, terutama bagi Masyarakat Parado Rato yang kontra terhadap Pertambangan. Masyarakat seketika dikagetkan hadirnya perusahaan pertambangan yang akan mengelola Sumber daya alam di wilayah mereka. Sementara, tidak ada informasi awal dari Pemerintah dan Instansi teknis apa kegiatan dari perusahaan itu, mereka tidak melakukan sosialisasi menyeluruh melainkan mereka melakukan sosialisasi pada kalangan tertentu saja, maka dari itu lahir yang namanya pro kontra terhadap pertambangan ini, sebagian tau dan sebagian tidak.

⁷⁰ Ahmad (63 tahun), Tokoh Masyarakat Parado Rato. *Wawancara* di Kediannya Parado Bima, 12 Mei 2017.

Salah satu gejala sosial sebagai akibat dari sikap pro dan kontra izin usaha pertambangan (IUP) adalah terjadi pada masyarakat Kecamatan Parado Kab. Bima. Masyarakat suatu pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan masyarakat pedesaan biasanya dikelompokkan atas dasar sistem kekeluargaan.⁷¹ Adanya hubungan yang erat di antara masyarakat dalam suatu desa, mendorong lahirnya kesamaan sikap dalam merespon suatu kebijakan pemerintah, yang diakomodir atas nama desa, sehingga sikap pro dan kontra atas kebijakan pemerintah tersebut membawa identitas desa masing-masing masyarakat Kecamatan Parado sikap pro dan kontra lebih dominan ditunjukkan oleh masyarakat Desa Parado Rato dan Desa Parado Wane.

Masyarakat Desa Parado Rato sebagai mayoritas yang menolak kehadiran pertambangan, sedangkan masyarakat Desa Parado Wane sebagai masyarakat yang mendukung kehadiran pertambangan, meskipun tidak bisa dipresentasikan sebagai mayoritas pendukung, akan tetapi keberadaan tokoh-tokoh yang pro terhadap kehadiran pertambangan menguatkan keberadaan Desa Parado Wane sebagai bagian dari masyarakat desa yang pro terhadap kehadiran pertambangan. Baik masyarakat Desa Parado Rato maupun Desa Parado Wane, Masing-masing memiliki alasan atas sikap pro dan kontranya.

Sementara bagi masyarakat yang mendukung kehadiran pertambangan. Kehadiran pertambangan dinilai dapat memberikan pekerjaan baru bagi

⁷¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 153.

masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran serta memperbaiki nasib.

Dengan alasan itulah mendorong masyarakat tetap pada pendirinya,

Adapun alasan yang di ungkapkan oleh Pak Jamaluddin yang pro terhadap pertambangan mengatakan bahwa:

Pihak-pihak pertambangan sering datang dan sering melakukan sosialisasi di desa kami desa Parado Wane ini, kami mendapatkan bantuan dari PT. Sumbawa Timur Mining dan dinikmati oleh masyarakat kami dan pada saat saya duduk di Pemerintah Desa pada tahun 2013 saya dekati mereka ternyata bukan proyek tapi bantuan lain, bentuknya itu memperbaiki tempat Pemaduan umum ada tiga titik di perbaiki dan bahkan saya bikin atap tempat pemandian yang besar dan alhamdulillah sangat dinikmati oleh masyarakat, kita terima program saja karna kita di tawarkan jadi apa salahnya kita menerima dari pada kita memasukan proposal kesana kemari di bohongi dan dijanjikan untuk masyarakat tetapi tidak keluar dan yang kedua bahwa Masjid dan Musholah juga diberikan bantuan dan bahkan masyarakat yang ada merekapun tidak tau ini bantuan mengenai program apa tapi yang pastinya kalau di tawarkan ya di terima saja kita nda bisa apa- apa karna masyarakat iya kan kita juga iya kankan begitu, Ada banyak bantuan yang diberikan termasuk bibit ayam pokonya banyak sekali.⁷²

Ternyata bukan saja masyarakat desa Parado Wane yang menyetujui akan adanya pertambangan melainkan semua desa yang ada menyetujui akan kehadiran pertambangan kecuali desa Parado Rato, dan ternyata empat desa yang ada di Kecamatan Parado ini telah mendengarkan arahan dari kepala desanya bahwa pertambangan ini bisa mensejahterakan kehidupan seperti yang di katakan oleh pemerintah desa kanca Pak Zumadi Abubakar yang mengatakan bahwa:

pada awalnya pemerintah itu tidak ada yang melakukan sosialisasi tetapi pada saat ada masalah mereka muncul memanggil kepala desa ataupun pemerintah desa secara keseluruhan mereka tidak berani melakukan sosialisasi sama masyarakat tapi awalnya saya dengar-dengar informasi bahwa kehadiran mereka langsung turun di camat dan camatlah yang mengsosialisasikan kepada masyarakat tetapi mereka tidak berani. Kalau masalah masyarakat desa kanca hanya sekian porsen yang tidak menerima karna sudah luas sosialisasinya dan seperti desa parado wane pada awal-

⁷²Jamaluddin (43 tahun), Kepala Desa Parado Wane. *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Wane, 10 Mei 2017.

awalnya 70 atau 80% yang menolak setelah ada sosialisasi dan diberikan bantuan mereka banyak menerima sama dengan kanca, kuta dan hanya parado rato saja yang tidak menerima, kenapa masyarakat menerima karna banyak lapangan pekerjaan., seperti di Kecamatan. Hu,u Kabupaten Dompu saya pernah berkunjung disitu rumah-rumahnya kumuh semua tetapi setelah ada tambang mereka seperti rumah pegawai semua cuman kerjanya tukang masak dan tukang ini itu⁷³

Itulah alasan masyarakat yang pro terhadap pertambangan dikarenakan karena dinas-dinas terkait memang telah melakukan sosialisasi dan juga telah memberikan bantuan tetapi tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang ada di kecamatan Parado sehingga melahirkan yang namanya pro dan kontra terhadap pertambangan.

Penolakan warga yang kontra sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Karena perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi yang akan digarap ketika perusahaan mengantongi izin eksploitasi. Yang terjadi di lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan terjadi akibat izin eksploitasi yang dikantongi oleh PT. Sumbawa Timur Mining, hal demikian inilah yang mengawali terjadinya hubungan disharmonis antara pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Bima dengan Masyarakat Kecamatan Parado

Ketidak cocokan penggunaan lahan/Sumber Daya Alam disinyalir karena Pemerintah Kabupaten Bima tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga perihal rencana penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari Bupati Bima atas pengesahan Izin Usaha Penambangan di

⁷³Zumadi Abubakar (40 tahun), Sekretaris Desa Parado Kanca. *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Kanca, 15 Mei 2017.

kecamatan Parado Kabupaten Bima oleh Bupati Bima Fery Zulkarnain ST tersebut.

Hasil pengamatan dan wawancara bebas dan mendalam dengan para informan di lapangan tampak menunjukkan hal itu bahwa permasalahan di wilayah pertambangan Kecamatan Parado Kabupaten Bima adalah terjalin dalam bentuk interaksi antara pihak PT. Sumbawa Timur Mining dengan pemerintah Kabupaten Bima sehingga melahirkan kebijakan pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 Tentang Izin pertambangan.

Atas dasar itulah pemecahan masalah di Kecamatan Parado bila ditinjau dari sudut pandang sosiologis berarti pemecahan yang harus dimulai dengan menganalisa hubungan antar golongan atau lapisan masyarakat yang menguasai tanah dan aset atau modal lain, dilanjutkan dengan usaha-usaha untuk mengubah hubungan-hubungan tersebut. Dalam artian, harus dipahami adanya lapisan yang penguasaannya kuat seperti pemilik tanah di wilayah pertambangan, ada pula yang lemah dan tidak memiliki tanah atau sama sekali tidak mempunyai kuasa apa pun sehingga menjadi sangat dependent dan hanya kepercik sampah industri. Hal ini didasari oleh kombinasi faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial, dan ketiganya sukar dipisahkan secara sempurna.

Keterjalinan kepentingan politik, ekonomi dan sosial merupakan suatu kenyataan yang harus kita ungkapkan secara berani dan obyektif, tanpa menimbulkan ungkapan seperti mengadu domba atau memecah belah lapisan-lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan atau istilah dalam penelitian ini hubungan disharmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks eksploitasi tambang terhadap sumber daya alam yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, keberadaan perusahaan tambang Emas belum memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kecamatan Parado Kabupaten Bima, malah yang terjadi fakta empirik justru menunjukkan hal sebaliknya yaitu perusahaan tambang emas merugikan masyarakat lokal dan merusak lingkungan. Akhirnya, jika ditinjau dari faktor keberlanjutan sebagai akibat dari eksplorasi sumber daya alam oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM), maka secara *otomatically* mempengaruhi kesuburan tanah dan tingkat kesuburan tanaman dan persawahan masyarakat Kecamatan Parado dan sekitarnya.

3. Eksplorasi Sumber Daya Alam oleh PT. Sumbawa Timur Mining

Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mengeluarkan SK pertambangan membawa dampak bagi masyarakat terlebih dengan minimnya sosialisasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dinas pertambangan, sehingga terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat, kesalahpahaman tersebut memicu konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat. Kehadiran PT Sumbawa Timur Mining hanya mempengaruhi ekonomi para elit lokal, keuntungan hanya didapatkan oleh oknum tertentu, sehingga keadilan tidak didapatkan, masyarakat mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai sebagai sebuah kebijakan sepihak, pernah dilakukan upaya penyelesaian dengan menghadirkan pihak pemerintah melalui Dinas Pertambangan akan tetapi segala masukan dan arahan itu tidak terealisasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Keberadaan perusahaan tambang emas seperti PT. Sumbawa Timur Mining (STM), yang terdapat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima telah berdampak nyata dalam mempengaruhi pola interaksi sosial dan pola hubungan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yaitu Masyarakat Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Perubahan pola interaksi sosial masyarakat sangat jelas kelihatan terutama jika dibandingkan dengan keadaan sebelum perusahaan tambang emas oleh PT. Sumbawa Timur Mining masuk dan setelah PT. Sumbawa Mining beroperasi.

Perubahan pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat sebelum PT. Sumbawa Timur Mining masuk adalah pola interaksi sosial yang bersifat asosiatif berupa hubungan kerjasama yang bersifat intim dan akrab antara satu orang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Hubungan-hubungan yang bersifat asosiatif tersebut tidak hanya berlangsung di dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri saja, tetapi juga dapat berlangsung pada masyarakat secara luas. Singkat kata, interaksi sosial yang terjadi pada Masyarakat Kecamatan Parado sebelum industri tambang masuk adalah interaksi sosial yang bersifat asosiatif.

PT. Sumbawa Timur Mining melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Parado, secara otomatis dapat merubah pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pola interaksi sosial yang terjadi setelah masuknya industri pertambangan emas oleh PT. Sumbawa Timur Mining adalah lebih diwarnai oleh interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau hubungan sosial yang bersifat konfliktual. Pertentangan atau konflik yang terjadi dalam

masyarakat bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (antar keluarga), masyarakat dengan pihak perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah (Kabupaten Bima).

Kehadiran industri pertambangan oleh PT. Sumbawa Timur Mining hanya membawa perpecahan, permusuhan dan konflik dalam masyarakat yang berujung pada hubungan disharmonis antara Masyarakat dengan pemerintah. Konflik yang terjadi dalam masyarakat seperti terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pihak perusahaan, antara masyarakat dengan pihak pemerintah (Kabupaten Bima). Melacak resistensi masyarakat Kabupaten Bima terhadap kebijakan kepala daerah dalam hal ini Bupati Bima yang berkaitan dengan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang mangan dan emas menunjukkan demokrasi semu yang hanya secara prosedural, tidak adanya ruang publik untuk berpartisipasi. Siklusnya rakyat hanya berpartisipasi sebatas pada pesta prosedural demokrasi (Pemilihan Kepala Daerah) setiap lima tahun.

Hak memilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah secara nyata dan bermakna secara tidak langsung rakyat memberikan aspirasi kepada figur yang terpilih sebagai pemimpin politik. Tetapi, pada konteks kebijakan, yakni komposisi, bentuk, dan konstruksi (konfigurasi) politik untuk partisipasi rakyat dalam formulasi dan implementasi kebijakan belum terwujud. Hal ini, ditandai oleh adanya resistensi masyarakat terhadap izin eksplorasi dan eksploitasi tambang mangan dan emas berdasarkan Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Bima bernomor 188/2010 kepada PT Sumbawa Timur Mining.

Kebijakan tersebut lebih kepada pemahaman kebijakan yang bersifat *top down* menempatkan garis lurus (kesamaan pemahaman) pengambil keputusan dengan masyarakat disaat keputusan politik tersebut diimplementasikan. bahwa dampak dari kebijakan itu hanyalah merupakan persoalan instrumental belaka, sehingga dalam suasana sosial, ekonomi dan politik yang bagaimanapun, selalu mampu dikontrol sepenuhnya oleh sang pemilik alat, yakni pembuat kebijakan. Padahal, dampak kebijakan, entah itu berada pada ranah kebijakan sosial yang sederhana sekalipun beserta semua proses-prosesnya sebagai pemicu yang melahirkan dampak sering punya hukum-hukumnya tersendiri. Sangat mustahil rakyat tidak melegitimasi suatu keputusan politik jika suatu keputusan telah disepakati bersama rakyat. Artinya tidak ada ruang partisipasi dalam proses formulasi kebijakan eksplorasi dan eksploitasi tambang mangan dan emas di Kabupaten Bima.

a. Dampak Eksplorasi PT. Sumbawa Timur Mining

Jika memang tujuan dari diberikannya IUP oleh Bupati Fery Zulkarnain ST tersebut adalah murni untuk kemakmuran rakyat harusnya masyarakat juga diharapkan mendukung keputusan Bupati Bima Fery Zukarnain ST. Ketidakcocokan penggunaan lahan/Sumber Daya Alam ini disinyalir karena Pemerintah Kabupaten Bima tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga perihal rencana penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari Bupati Bima atas pengesahan Izin Usaha Penambangan di kecamatan Parado Kabupaten Bima oleh Bupati Bima Fery Zulkarnain ST tersebut.

Hasil pengamatan dan wawancara bebas dan mendalam dengan para informan di lapangan tampak menunjukkan hal itu bahwa permasalahan di wilayah pertambangan Kecamatan Parado Kabupaten Bima adalah terjalin dalam bentuk interaksi antara pihak PT. Sumbawa Timur Mining dengan pemerintah Kabupaten Bima sehingga melahirkan kebijakn pemerintah dalam bentuk SK Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 Tentang Izin pertambangan.

Atas dasar itulah pemecahan masalah di Kecamatan Parado bila ditinjau dari sudut pandang sosiologis berarti pemecahan yang harus dimulai dengan menganalisa hubungan antar golongan atau lapisan masyarakat yang menguasai tanah dan aset atau modal lain, dilanjutkan dengan usaha-usaha untuk mengubah hubungan-hubungan tersebut. Dalam artian, harus dipahami adanya lapisan yang penguasaannya kuat seperti pemilik tanah di wilayah pertambangan, ada pula yang lemah dan tidak memiliki tanah atau sama sekali tidak mempunyai kuasa apa pun sehingga menjadi sangat dependent dan hanya kepercik sampah industri. Hal ini didasari oleh kombinasi faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial, dan ketiganya sukar dipisahkan secara sempurna.

Keterjalinan kepentingan politik, ekonomi dan sosial merupakan suatu kenyataan yang harus kita ungkapkan secara berani dan obyektif, tanpa menimbulkan ungkapan seperti mengadu domba atau memecah belah lapisan-lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan atau istilah dalam penelitian ini hubungan disharmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks eksploitasi tambang terhadap sumber daya alam yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, keberadaan perusahaan tambang Emas belum memberikan

kontribusi positif bagi masyarakat Kecamatan Parado Kabupaten Bima, malah yang terjadi fakta empirik justru menunjukkan hal sebaliknya yaitu perusahaan tambang Emas merugikan masyarakat lokal dan merusak lingkungan.

Akhirnya, jika ditinjau dari faktor keberlanjutan sebagai akibat dari eksplorasi sumber daya alam oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM), maka secara *otomatically* mempengaruhi kesuburan tanah dan tingkat kesuburan tanaman dan persawahan masyarakat Kecamatan Parado dan sekitarnya. Tentu saja demikian, karena debu dan asap tebal yang mengepul ke udara tak mengenal waktu, itu adalah akibat langsung dari aktivitas perusahaan tambang yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Parado. Tanaman perkebunan dan persawahan, Peternakan, sumur-sumur dan sumber mata air yang menjadi andalan masyarakat selama ini mengalami masalah. Demikian pula *Income generating* dan ancaman degradasi lingkungan menjadi masalah serius bagi masyarakat Kecamatan Parado dan sekitarnya.

Atas dasar inilah, maka evaluasi secara periodik terhadap keberadaan perusahaan tambang emas oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM) perlu dilakukan. Apabila ternyata dampak negatif lebih besar daripada dampak positif, maka sebaiknya operasi dan eksplorasi perusahaan tambang segera dihentikan. Jika tidak, maka bersiaplah untuk menyaksikan malapetaka lingkungan dan kemanusiaan yang cepat atau lambat akan menggelejar di permukaan bumi Kecamatan Parado dan sekitarnya.

b. Eksplorasi melahirkan konflik vertikal

Salah satu sasaran Surat Keputusan Bupati Bima No. 188 untuk izin usaha pertambangan dengan melakukan eksploitasi hutan adalah di Kecamatan Parado yang dilakukan oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM). Kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining (STM) di Kecamatan Parado tidak melakukan upaya sosialisasi langsung pada masyarakat luas sehingga menyebabkan reaksi yang beragam dari masyarakat.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah dan Masyarakat, Masyarakat dan Masyarakat yang terjadi di kecamatan Parado adalah Murni Konflik Vertikal karna disebabkan surat Keputusan Bupati bima yang menurut Penelitian ini tidak ada sosialisasi pemerintah Terhadap Kebijakan yang dikeluarkan dan langsung diterapkan dan di implementasikan Langsung di kecamatan Parado seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Parado Rato Fry Hari Faturrahman mengatakan bahwa:

Sejak adanya isu pertambangan di Kecamatan Parado, kami mahasiswa dan masyarakat pada saat itu melakukan kajian intensif yang mendalam dan riset kecil-kecilan mengenai pertambangan ini di karenakan kami belum mengetahui apakah betul tambang ini ada atau tidak, oleh karena itu kami melakukan observasi yang berangotakan 12 orang pada saat itu pada tanggal 10 juli tahun 2010 kami mahasiswa dan masyarakat pada saat itu ke wilayah eksplorasi pertambangan untuk melihat apakah betul tambang ini ada atau tidak dan ternyata betul ada. Tempat Helikopter luasnya sebesar 1 Ha dan kami juga melihat di lokasi itu sudah ada Pemboran raksasa yang cukup besar di lokasi tersebut, setelah kami melakukan observasi di Wilayah pertambangan ini kami kembali disini untuk melakukan audensi sama pihak-pihak yang terkait. dinas pertambangan, dinas Kecamatan dan dinas Kabupaten serta dinas-dinas yang terkait ini tidak memberikan jawaban terkait dengan sosialisasi, karna saya tidak terjun langsung dalam hal ini, namun saya mendengar isu bahwa memang ada isu mereka melakukan sosialisasi namun sosilisasi itu hanya di ambil dari segelintir orang seperti tokoh masyarakat satu orang, tokoh adat, tokoh agama, untuk di undang mendengarkan sosialisasi pertambangan

tersebut. yang terlibat dalam sosialisasi tersebut dari dinas pertambangan ada, pihak Pemerintah ada, Kepolisian dan TNI ada. Terkait dengan kegiatan ini sebenarnya bukan satu kali saja tetapi ada satu kali dalam satu bulan satu kali dalam empat bulan katanya. Tetapi yang terjadi di Kecamatan Parado khususnya Parado Rato belum ada sama sekali itu yang saya tau. ⁷⁴

Minimnya sosialisasi oleh pemerintah terkait rencana masuknya pertambangan menjadikan masyarakat kaget dengan kebijakan tersebut. Sebab sebelumnya masyarakat yang menebang pohon di hutan atau membuka lahan baru saja biasanya di tangkap dan di penjara padahal dilakukan oleh masyarakat Parado sendiri. Sementara pertambangan masuk dalam Wilayah Kecamatan Parado tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemilik dan langsung melakukan pembabatan hutan justru tidak dilarang dan ditangkap oleh pemerintah. Masyarakat awam menganggap bahwa hal seperti inilah yang membuat mereka merasa tidak adil baik dimata pemerintah maupun dimata hukum, padahal dampaknya jauh lebih besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itulah yang mendorong masyarakat yang berujung pada gejolak pertambangan pada tahun 2011.

Konflik yang terjadi pasca penerbitan Surat Izin Penambangan No. 188/2010, memiliki rentetan perjalanan yang panjang, yang penulis gambarkan dalam tabel berikut.

⁷⁴Fry Hari Fathurrahman (26 tahun), Sekretaris Desa Parado Rato, *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Rato, 09 Mei 2017.

Tabel VI
Kronologi Peristiwa Perlawanan Rakyat Parado

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
10 juli 2010	Observasi mahasiswa dan masyarakat	Mahasiswa dan Masyarakat yang berangotakan 12 orang Melakukan Observasi di lokasi Pertambangan Apakah tambang ini ada atau tidak ternyata betul ada.
Pertengahan 2010	Sosialisasi pertambangan	Pemerintah Kabupaten Bima periode 2005-2010 dan 2010-2015 dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bima
Februari 2011	Pembentukan team investigasi pertambangan	Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado (IMAPPA)
Februari 2011	Pembentukan team 9	Terdiri dari berbagai unsur tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa
14 Februari 2011	Pembakaran Base Camp Pertambangan	Sekitar 1000 orang yang terdiri dari Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat yang menolak pertambangan
16 Februari 2011	Aksi Damai di persimpangan terminal Parado Rato	Dipelopori oleh IMAPPA, pemuda dan masyarakat
24 Februari 2011	Penangkapan Ahmadin oleh Anggota Polres Bima dan pembakaran Kantor Polsek Parado	Massa melakukan unjuk rasa di depan kantor Polsek Parado meminta pembebasan Ahmadin
24 Februari 2011	Pembakaran rumah aktor tambang dan Kantor Desa Parado Rato	Pelaku pembakaran tidak teridentifikasi sampai saat ini
	Pembunuhan aktivis penolak tambang	Orang tidak dikenal, tetapi beraviliasi dengan tokoh pro pertambangan
Setiap 24 Februari 2012-2014	Aksi peringatan tragedi 188	Dilakukan oleh Mahasiswa IMAPPA, pemuda dan Masyarakat anti pertambangan di Lapangan Desa Paradi Rato
24 Februari 2015	Upacara peringatan Tragedi 188 dan terbunuhnya Kaur Desa Parado Wane	Dilakukan oleh gabungan Mahasiswa Bima (Imappa), Makassar (IMPAR) dan Mataram (IPERMA-PEPABRI di Lapangan Parado dan di Lokasi peristiwa 188)

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Berbagai Narasumber

Konflik timbul karena adanya ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan antar pihak, diantaranya kesenjangan sosial, kurang meratanya kemakmuran, perbedaan akses terhadap sumber daya, diskriminasi dan lain sebagainya. Faktor yang melatar belakangi sehingga terjadi konflik adalah Seperti yang dituturkan oleh mantan Koordinator lapangan Demonsran Ahmadin:

Konflik yang terjadi sampai hari ini adalah konflik karena adanya Pertambangan, masyarakat Parado dimulai dari mahasiswa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, menolak hadirnya pertambangan ini dengan alasan bahwa Pertambangan ini tidak memberikan kontribusi yang besar untuk masyarakat yang ada di Desa Parado. Masyarakat Parado juga menilai bahwa Pertambangan itu dapat merusak habitat-habitat yang ada di Wilayah Kecamatan Parado, antara lain pembabatan hutan penyakit sosial, menurut analisa para tokoh-tokoh yang ada di Desa Parado Rato dan mahasiswa, kehadiran Tambang ini bisa berpengaruh pada Budaya-budaya global dan menghasilkan porstitusi, pencemaran penyakit sosial maupun penyakit udara di khawatirkan ada limbah Pertambangan karna isu yang beredar bahwa limbah Pertambangan itu akan dibuang di sekitar Daerah Kecamatan Parado. alasan terkuatnya Masyarakat Parado menolak adanya Pertambangan adalah karna masyarakat Parado ini lebih dulu meyakini akan adanya bendungan sori bura (bendungan sungai putih) yang dapat mengairi 500 hektar lahan yang tanda hujan sehingga dengan pikiran masyarakat kalaupun Bendungan Sungai Putih ini datang yang dikerjakan oleh Pemerintah melalui dana dari Australia itu sukses maka panen yang satu kali setahun ini akan bisa 3 kali setahun kalaupun Air Sungai Putih ini datang itulah alasan kuatnya masyarakat Parado, terjadinya konflik adalah karena pemerintah beda pendapat dengan kita karna itu dari teman-teman Pertambangan kemungkinan berpikir ketika dimanfaatkan alat-alat Negara itu tidak efektif mereka medekati para tokoh-tokoh pro Pertambangan untuk dijadikan alat mereka karna itulah terjadinya konflik, Surat Keputusan ijin Pertambangan ini sudah ada dan sudah di tanda tangani oleh Bupati H. Feri Zulkarnain. Surat Keputusan 188 yang keluar di tanda tangani pada tahun 2010 pas pada masa jabatan H. Feri Zulkarnain jadi rujukanya ada pada kontrak karya pada masa Pak Harto ini alasanya karna kebetulan saya ada pada Dinas Pertambangan dan Energi di Kab. Bima pada saat itu, memang sosialisasi pada saat itu belum menyeluruh sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara gelap-gelapan mengundang para tokoh yang memang mereka menganggap bahwa tokoh ini pro Pertambangan dan tidak memang mengundang tokoh-tokoh yang lain yang di sebut tokoh anti Pertambangan jadi kita di kalangan mahasiswa pada saat itu memang mempertanyakan tidak transparanya seperti ini cara

sosialisasi Pemerintah seperti ini, Sentral konflik yang terjadi di Kecamatan Parado ini adalah konflik dengan hadirnya Pertambangan walaupun Pertambangan ini tidak ditiadakan atau dihapuskan di wilayah ini saya begitu yakin bahwa konflik yang ada di Kecamatan Parado ini tidak akan ada lagi.⁷⁵

Konflik Pertambangan Bermula dari kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bima melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bima melakukan sosialisasi pertambangan pada tokoh masyarakat Parado pada pertengahan tahun 2010. Kehadiran wacana Pertambangan melahirkan sikap pro dan kontra. Terutama lahir dari unsur tokoh pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian dari kehadiran pertambangan khususnya yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan (amdal) bagi kehidupan masyarakat.

Sosialisasi ternyata memang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tetapi hanya pada kalangan tertentu saja dan sosialisasi ini hadir pada saat pertambangan sudah melakukan eksploitasi di tempat tersebut, seperti yang diutarakan oleh pak Ruslin Staf Camat Parado Mengatakan Bahwa:

Sebenarnya sosialisasi mengenai Pertambangan memang di lakukan sosialisasi pada saat itu tetapi hanya kepada Pemerintah saja seperti di kantor Camat dan di kantor Desa saja tidak di lakukan sosialisasi di tempat-tempat yang sering masyarakat berkumpul duduk diskusi dll. cuman duduk hanya di ruang lingkup pemerintah saja., awalnya pada saat Camat pak Ibrahim sebenarnya tidak ada masalah karna adek-adek mahasiswa mengajak duduk untuk berdiskusi sama pemerintah camat namun pada saat itu pemerintah Kecamatan enggan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berdiskusi sehingga mahasiswa datang menanyakan dan menuntut mengenai Kebijakan pemerintah terhadap kehadiran Pertambangan di Kecamatan Parado yang tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ Ahmadin, (30 tahun) Aktivis Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado (IMAPPA), *Wawancara*, di Kediannya, Parado Bima 17 Mei 2017.

⁷⁶ Ruslin (37 tahun), Staf Camat Kecamatan Parado. *Wawancara*, di Kantor Camat Parado, 19 Mei 2017.

Sebagai respon dari wacana tersebut, Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado (IMAPPA) membentuk team investigasi salah satunya Ahmadin, langkah pertama yang dilakukan oleh team investigasi adalah mencari data riil tentang keberadaan pertambangan pada dinas terkait serta melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi pertambangan yang terletak di *Humpa Leu Sori Bura*. Berdasarkan data dari dinas terkait, bahwa luas lokasi pertambangan sekitar 100 meter, namun di lapangan justru team investigasi menemukan ketidak sesuaian luas wilayah bahkan mencapai 2 hektar.⁷⁷

Setelah terbentuknya team investigasi, maka dibentuk pula team 9 untuk memperkuat penolakan pertambangan. Kehadiran team 9 dimaksudkan untuk membuat rekomendasi penolakan terhadap kehadiran pertambangan yang dinilai dapat merugikan masyarakat sekaligus untuk merespon desakan dari team investigasi yang terbentuk sebelumnya.

Team 9 terdiri dari berbagai unsur, baik tokoh agama, masyarakat maupun tokoh pemuda dan mahasiswa. Dalam perkembangannya terjadi misi yang berbeda dari misi awal pembentukannya, keberadaan team 9 bukan lagi untuk menolak pertambangan, namun berbalik arah yaitu menginventarisir segala sumber daya alam di Parado untuk dilaporkan di Bupati Bima, agar kelak ketika pertambangan masuk, maka masyarakat mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Pada akhirnya team 9 kehilangan kepercayaan dari mahasiswa dan masyarakat, akibat disusupi oleh kepentingan politik di dalamnya. Hal itu didukung oleh salah satu anggota team 9 yang merupakan kader Partai Amanat Nasional pendukung Bupati Bima saat itu.

Tanggal 14 februari 2011, mahasiswa dan masyarakat melakukan long march untuk bersama-sama meninjau langsung lokasi pertambangan dengan jumlah

⁷⁷Husni (30 tahun), Aktivis Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado (IMAPPA), wawancara Bima, 30 Mei 2017.

massa sekitar 1000 orang, di lokasi pertambangan massa melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung bagaimana kerusakan hutan akibat penebangan pohon. Selain itu, massa juga menemukan bahwa titik bor pertambangan terletak sekitar 20 meter dari lokasi pembangunan Embung *Sori Bura*. Pembangunan Embung *Sori Bura* dimaksudkan sebagai pusat irigasi yang nantinya akan dialirkan ke pusat persawahan dan perkebunan masyarakat Parado di antaranya *So Dafa*, *Owa*, *Karobo* sampai ke *Tolo Sera*.⁷⁸

Pembangunan Embung *Sori Bura* dibawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum., yang menelan anggaran yang besar sekitar 5 M. Pembangunanya dimulai sejak tahun 2014, namun mengalami kendala dan permasalahan pengerjaan, sehingga tahun 2015 pembangunan Embung *Sori Bura* distopkan untuk sementara, kemudian dilanjutkan kembali dengan anggaran yang baru pada tahun 2016. Ditahun yang sama pun pembangunannya mengalami masalah yang sama sebagaimana tahun sebelumnya. Sehingga pengerjaannya pun terkendala sampai saat ini. Padahal keberadaan Embung *Sori Bura* dimaksudkan sebagai salah satu alasan penolakan kehadiran pertambangan. Sebab, antara pertambangan dan pembangunan Embung tidak bisa dan selalu bertolak belakang. Embung dimaksudkan untuk menampung air, sementara pertambangan tidak membutuhkan air dan justru menghilangkan sumber-sumber mata air.

Masyarakat yang meninjau lokasi pertambangan tentu menyaksikan langsung bagaimana keberadaan eksplorasi pertambangan dan pembangunan Embung *Sori Bura* yang berdekatakan dan pastinya akan mencemari lingkungan dan sumber air di Embung tersebut. Masyarakat yang kesal mulai bertindak anarkis dan sulit dikendalikan. Sehingga, terjadi pengrusakan peralatan

⁷⁸*So Dafa*, *Owa*, *Karobo* dan *Tolo Sera* merupakan pusat lokasi persawahan masyarakat Parado umumnya.

pertambangan serta pembakaran *base camp* pertambangan. Aksi massa tersebut setidaknya merugikan pihak pertambangan.

Saat aksi di *Humpa Leu* dan *SoriBura*, ada isu yang berkembang bahwa terdapat dua kompi kepolisian sedang merengsek naik ke lokasi pertambangan untuk melakukan penangkapan terhadap massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran *base camp* pertambangan. Mendengar isu tersebut massa pun menyatukan barisan kemudian bersama-sama turun dari lokasi pertambangan menuju desa Parado Rato untuk menghindari penangkapan oleh aparat. Saat perjalanan pulang dari lokasi pertambangan, massa mendapatkan informasi dari anggota yang tidak ikut aksi, bahwa telah ada laporan masuk di Polsek Parado tentang isu penganiayaan yang dilakukan oleh As'ari dan Salahuddin (Peki) dimana keduanya menganiaya karyawan pertambangan, salah satunya bernama Sirajudin yang juga merupakan masyarakat Desa Parado Rato, pemberi laporan palsu tersebut tidak lain merupakan adik kandung dari Sirajudin yang bernama Ahmad (Pici). Padahal sebenarnya tidak ada penganiayaan di lokasi pertambangan, yang ada justru tokoh-tokoh penggerak massa memerintahkan kepada para karyawan yang juga merupakan masyarakat Parado agar lari dan meninggalkan lokasi pertambangan, untuk menghindari amukan massa.

Akhirnya massa pun menuju kantor Polsek Parado untuk mengklarifikasi langsung perihal laporan tersebut, dalam perjalanan menuju kantor Polsek Parado, massa melihat pelaku yang melaporkan laporan palsu tadi, Ahmad (pici) pun dipukul oleh sebagian massa yang merasa gerah atas laporan palsu tersebut, namun untungnya dapat dilerai oleh massa lainnya.

Tanggal 16 Februari 2011 massa yang tergabung dari elemen mahasiswa, tokoh pemuda dan masyarakat umum melakukan demonstrasi dipersimpangan terminal Parado. Aksi massa menuntut dicabutnya izin pertambangan sekaligus

memberikan informasi kepada masyarakat Parado terutama terhadap masyarakat tidak ikut dalam aksi beberapa hari sebelumnya tentang keberadaan pertambangan serta kerusakan hutan. Sehingga menguatkan dukungan kepada masyarakat luas akan pentingnya menolak kehadiran pertambangan.

Tanggal 24 Februari 2011 terjadi penangkapan terhadap aktivis yang bernama Ahmadin yang juga merupakan pemuda Parado Rato oleh anggota Polres Bima dengan tuduhan sebagai salah satu pelaku yang memprovokasi massa sampai terjadi pembakaran *Base Camp* milik PT. Sumbawa Timur Manning. Penangkapan terjadi saat yang bersangkutan hendak berkunjung ke Kota Bima. Penangkapan Ahmadin berbuntut panjang terhadap stabilitas masyarakat, khususnya masyarakat Desa Parado Rato. Merespon penangkapan terhadap Ahmadin, masyarakat pun mendatangi Kantor Polsek Parado untuk mempertanyakan perihal penangkapan tersebut, sebab sebelumnya Kanit Reskrim Polsek Parado Iptu Edi Prayetno mengatakan bahwa tidak ada penangkapan terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang melakukan demonstrasi di *Base Camp* pertambangan, Ahmadin yang Aktivis Ikatan Mahasiswa Parado Bima Pada saat itu Mengatakan Bahwa:

Saat itu saya sedang ke Bima atas permintaan tetangga yang kebetulan keluarganya di Malaysia mengirimkan uang sebanyak 10 juta lewat rekening saya, awalnya saya tidak ingin keluar dari Kec. Parado karna saya menyadari bahwa saya masuk dalam pengawasan pihak kepolisian, namun karena tetangga tersebut menangis dan sangat mengharapkan bantuan saya, maka dengan terpaksa saya pun ke Bima dan akhirnya saya ditangkap oleh anggota Polres Bima dan dihukum dengan pasal provokasi massa sampai terjadinya pembakaran *bace camp* pertambangan dan saya divonis 8 bulan kurungan.⁷⁹

Terjadi dialog yang alot antara masyarakat dan kepolisian, penjelasan Aiptu Zainal tidak memuaskan massa. Sehingga membuat situasi memanas dan sulit dikendalikan yang berujung pada pengrusakan dan pembakaran Kantor

⁷⁹Ahmadin, (30 tahun) Aktivis Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado (IMAPPA), *Wawancara*, di Kediannya, Parado Bima 20 Mei 2017.

Polsek Parado. Kondisi massa yang sudah diluar kontrol membuat Kapolsek Parado Aiptu Zainal meminta kepada masyarakat agar mengamankan dirinya di Lapangan Parado Rato, karena di sekitar lapangan terdapat konsentrasi massa yang banyak, akhirnya demi keselamatan Kapolsek meminta dirinya untuk diamankan disalah satu rumah warga, maka dipilihlah rumah Abdul Azis Yaman (Jon Ryo) sebagai tempat mengamankan Kapolsek seperti yang di utarakan oleh

Badan Pengawas Desa As'ari mengatak bahwa:

Kapolsek pada saat itu bukan disandera, melainkan beliau sendiri yang meminta kepada kami untuk diamankan karena melihat kondisi massa yang sulit dikendalikan. Awalnya beliau meminta diamankan dilapangan, namun karena konsentrasi massa juga cukup banyak dilapangan. Akhirnya Kapolsek pun di bawa ke salah satu rumah warga, maka dipilihlah rumah Abdul Azis Yaman (Jhon Rio), di rumah tersebut kami makan dan minum kopi serta sholat bersama dengan Bapak Kapolsek.⁸⁰

Suhardin selaku Kepala Desa Parado Rato yang juga merupakan salah satu anggota kepolisian, datang ke tempat dimana Kapolsek diamankan. Kehadiran Kades Parado Rato adalah sebagai utusan kepolisian meminta agar Kapolsek dibebaskan. Setelah dialog yang panjang permintaan Kades pun tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Akhirnya Kapolsek Parado mengutus seorang anggota Polsek Parado yang bernama Azhar untuk menyampaikan keinginan masyarakat di Polres Bima.

Di Polres Bima ternyata telah ada dua laporan yang masuk, pertama dari Kades Parado Rato bahwa Kapolsek telah terluka dan akan dibunuh, sementara dari utusan Polsek Parado mengatakan bahwa Kapolsek dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar informasi yang masuk Kapolres Bima AKBP Fauzan Barito kala itu memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan pembebasan terhadap anggotanya yang merupakan Kapolsek Parado yang sedang dalam pengawasan masyarakat Parado.

⁸⁰As'ari (40 tahun), Ketua Badan Pengawas Desa Parado Rato, *Wawancara*, Bima, 28 Mei 2017.

Akibat informasi tersebut menimbulkan reaksi dan tindakan represif dari aparat kepolisian dengan mengirim tiga peleton aparat Samapta dan satuan peleton aparat Brimob bersenjata lengkap masuk ke Desa Parado Rato untuk membebaskan Aiptu Zainal. Penembakan brutal aparat Kepolisian dan Brimob mendapat perlawanan dari masyarakat Parado Rato dengan alat seadanya, sebab kehadiran aparat yang bersenjata lengkap tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sehingga sejumlah warga pun terluka akibat terkena tembakan aparat, di antaranya: Ahmad (23 tahun) Mustaja (24 tahun) Kaharuddin (28 tahun) Sudirman (25 tahun) Muhtar (38 tahun) Landa (30 tahun) dan Abubakar (42 tahun).⁸¹ Korban tembakan aparat yang paling parah adalah Ahmad (23 tahun) yang terkena pada lututnya sampai akhirnya harus diamputasi, Ahmad Mengatakan Bahwa:

Saat itu saya sedang sibuk dengan aktivitas saya sebagai wirausahawan yang sedang mengelola tambak lele dumbo yang saya budidaya sekitar 3 bulan sebelum ada isu pertambangan, dengan kondisi badan saya yang kurang enak bertepatan dengan aksi penolakan tambang saya ke Cabang/terminal untuk membeli obat malaria guna meredam sakit malaria yang saya alami, saya juga tidak tau kalau di Parado wane pada saat bersamaan ternyata polisi sedang siap-siap untuk membubarkan massa di Parado rato, pada saat itu demontrasi massa sampai menjelang magrib, karna kondisi badan saya yang menggigil menjelang magrib dan bersamaan dengan masuknya waktu magrib sayapun menuju masjid. Sekitar 10 meter dari pintu gerbang masjid itulah saya terkena tembakan aparat kepolisian⁸²

Para korban tembakan aparat dilarikan ke Puskesmas Parado untuk mendapatkan pertolongan. Adanya isu penangkapan oleh aparat kepolisian membuat para korban yang sedang dirawat pada malam itu harus bergegas pulang ke rumah masing-masing karena rasa khawatir akan ditangkap. Sementara

⁸¹Media Garda Asakota “Kaki Korban Penembakan di Parado di Amputasi” <http://www.gardaasakota.com/2011/03/kaki-korban-penembakan-di-parado.html?m=015/03/2011> diakses 20 Juni 2017.

⁸² Ahmad (29 tahun), Guru Madrasah Aliyah, *Wawancara*, di Kediannya Parado Rato 15 Mei 2017.

Kapolsek dan dua orang anggotanya berhasil dibebaskan serta menahan beberapa orang yang saat itu tertembak dan tidak mampu melarikan diri di antaranya: Yakub, Azis Yaman alias Jhon Rio dan Sudirman.

Pasca penembakan brutal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Brimob, mencuat nama-nama aktivis penolak tambang yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Sehingga para aktivis mengamankan diri dengan meninggalkan Parado, sebagian ada yang menuju Kab. Dompu, Makassar, Mataram, Jakarta bahkan sampai Kalimantan dan tempat-tempat lain yang dianggap aman, dalam proses pelariannya tidak sedikit aktivis yang tertangkap.

Masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita, terjadi pembakaran kantor Desa Parado Rato dan salah satu rumah pekerja tambang yang bernama Sirajudin yang merupakan masyarakat Parado Rato. Pembakaran tersebut sebagai bentuk perlawanan masyarakat atas penembakan brutal aparat Kepolisian dan Brimob yang terjadi pada sorenya. Pelaku-pelaku pembakaran pun tidak diketahui identitasnya, karena tidak membawahi tokoh mahasiswa, masyarakat maupun pemuda. Peristiwa kebakaran pun menyita perhatian masyarakat sekitar. Sehingga antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling bahu membahu untuk memadamkan kobaran api. Kobaran api begitu cepat disebabkan adanya beberapa cergen bensin di dalam kios pemiliknya, karena merupakan penjual bensin dan kebutuhan lainnya.

Peristiwa tersebut tidak hanya menyita perhatian masyarakat Bima khususnya karena pemberitaan lewat surat kabar dan media-media lainnya, melainkan juga menjadi berita nasional karena diliput oleh stasiun televisi nasional. Sehingga tokoh-tokoh Parado yang ada di Jakarta juga ikut merespon persoalan tersebut. Salah satu tokoh Parado yang berada di Markas Besar (Mabes) Polri Brigjen Pol. Drs. H. Abdul Ghany Abubakar datang ke Parado sebagai

utusan Polri bersama dengan Kapolda NTB dan Kapolres Bima untuk meredam dan mengembalikan kondisi masyarakat seperti sedia kala.

Selain itu, hadir pula tokoh Bima lainnya, yaitu Jenderal Farouk Muhammad yang merupakan anggota DPD RI perwakilan NTB, untuk melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bertempat di Pondok Pesantren al-Mukhlisin Salama Parado. Kehadiran beliau untuk menjalankan fungsinya sebagai perwakilan daerah NTB di Senayan Jakarta. Kehadiran Farouk Muhammad di Parado adalah untuk meninjau langsung lokasi pertambangan serta memutihkan kembali nama-nama aktivis yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Bima. Langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan rasa was-was dan membuat suasana kembali kondusif.⁸³

Peristiwa penembakan oleh Polisi dan Brimob tersebut menjadi peristiwa bersejarah dan kemanusiaan yang luas biasa dalam sejarah kehidupan masyarakat Parado. Sehingga, setiap tahunnya dilakukan upacara dalam rangka memperingati tragedi berdarah. Peringatan tragedi berdarah tersebut dilakukan mulai tahun 2012, 2013 dan 2014 dalam rentang waktu itu kondisi masyarakat dapat dibilang kembali kondusif meskipun benih konflik tetap saja ada.

Pasca konflik pertambangan tahun 2011, aktivis dan masyarakat yang menolak kehadiran pertambangan kerap mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu, bahkan bukan hanya sekedar ancaman, melainkan sampai terjadinya pembunuhan. Seperti yang menimpa Syafruddin dan Hijir yang merupakan masyarakat Parado Rato yang sebelumnya berjuang dalam menolak pertambangan. Pembunuhan terhadap keduanya terjadi pada malam hari, saat keduanya menuju ke tente untuk membeli daging untuk keperluan khitanan

⁸³Fry Hari Fathurrahman (26 tahun), Sekretaris Desa Parado Rato, *Wawancara*, di Kantor Desa Parado Rato, 12 Mei 2017.

anaknya. Dalam perjalanan mereka dihadap oleh sekelompok orang, dan kelanjutan kasusnya tidak menemui titik terang.

Intimidasi juga dirasakan oleh salah satu aktivis yang berinisial MF, kerap mendapatkan ancaman baik terhadap dirinya secara langsung maupun orang tuanya, serta dikucilkan dalam masyarakat.

Sejak peristiwa Pengeluaran Surat Keputusan 188 yang di keluarkan oleh bupati Bima, saya sebagai mahasiswa selalu mendapatkan ancaman serta tekanan dari keluarga untuk tidak ikut dalam setiap aksi penolakan tambang. Selain itu saya juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari masyarakat sekitar, sehingga saya memilih keluar dari Parado.⁸⁴

Tanggal 24 Februari 2015 dilakukanlah aksi yang sama seperti yang biasa diperingati setiap tahunnya, untuk mengenang kembali tragedi berdarah 188 tahun 2011 silam oleh gabungan Mahasiswa Parado baik yang berada di Bima, Mataram maupun Makassar sedang berada di Parado untuk menikmati masa liburan kuliah, dibantu oleh tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya yang menolak kehadiran pertambangan. Aksi tersebut dimulai dengan melakukan sosialisasi keliling keseluruh desa dalam lingkup Kecamatan Parado kecuali Desa Lere karena memang jaraknya cukup jauh dari pemukiman desa-desa lainnya.

Sosialisasi tersebut mendapatkan reaksi negatif dari sekelompok masyarakat Parado Wane, setelah melakukan sosialisasi kegiatan pun dilanjutkan dengan upacara peringatan tragedi berdarah yang dilaksanakan di lapangan Desa Parado Rato yang dihadiri oleh mahasiswa, tokoh pemuda dan masyarakat umum. Setelah upacara, kegiatan pun dilanjutkan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan bagaimana kondisi penembakan oleh aparat Kepolisian dan Brimob kala itu.

Pasca upacara massa yang tergabung dalam gabungan mahasiswa Parado melakukan aksi keliling Desa untuk kedua kalinya setelah sebelumnya melakukan

⁸⁴ Miftahul Khair (25 tahun), Aktivis Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado (IMAPPA), *Wawancara*, Bima, 28 Mei 2017.

hal yang sama di desa Parado Wane dengan maksud mengundang seluruh masyarakat untuk ikut menyaksikan kembali video-video penembakan brutal kepolisian yang telah di dokumenter. Namun aksi itu tidak berjalan lancar karena dihadang oleh sekelompok massa pro pertambangan yang terdiri dari beberapa orang preman yang telah di *beck up* oleh oknum-oknum tertentu, aksi mahasiswa tersebut dinilai sebagai upaya provokatif terhadap masyarakat Parado wane.

Salah satu tokoh masyarakat yang juga sangat pro terhadap masuknya pertambangan dari Desa Parado Wane yang dipelopori oleh Ahmad Manan (Hama Mbuku) yang merupakan Kaur Desa Parado Wane, sempat berdebat dengan mahasiswa dan berkata sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap dirinya, menurut salah seorang mahasiswa yang bernama Mahmud Rayyan yang saat itu ada bersamanya, beliau sempat mengatakan.

Biarkan masyarakat bebas untuk menentukan pilihanya apakah mendukung atau menolak kehadiran pertambangan. Jangan lagi kalian yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kehadiran pertambangan.⁸⁵

Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya penghadangan aksi mahasiswa sampai terjadi pengrusakan *megaphone* yang digunakan untuk melakukan orasi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menghadapi segerombolan preman serta melakukan pengejaran terhadap beberapa mahasiswa dengan sebilah parang sampai membuat mahasiswa lainnya yang menyaksikan peristiwa itu khususnya para mahasiswi merasa histeris, dalam kondisi yang sangat trauma dan histeris tersebut mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan aksi kembali ke Parado Rato dengan angkutan mobil *pic up*. Sementara sebagian lainnya berlari menyelamatkan diri sambil dikejar oleh preman yang menggunakan sepeda motor

⁸⁵Mahmud Rayyan (23 tahun), Aktivis Ikatan Mahasiswa Parado Makassar (IMPAR), Wawancara, Makassar 17 Mei 2017.

sambil membawa sebilah parang, dalam proses pelarian itu ternyata masih ada salah satu mahasiswa yang tertinggal dari rombongan massa sebelumnya.

Penghadangan dan pengejaran terhadap sekelompok mahasiswa oleh sekelompok preman menyebabkan sekelompok pemuda Desa Parado Rato dan tokoh mahasiswa mendatangi para pelaku, penghadangan di antaranya yang ditemui dan ada di lokasi adalah Ahmad Manan (Hama Mbuku) dan Abdul Munir Mansur, kehadiran pemuda Parado awalnya untuk mempertanyakan perihal penghadangan aksi mahasiswa juga untuk menjemput salah satu aktivis yang tertinggal dari rombongan aksi. Sampai akhirnya terjadilah pembunuhan sadis yang menimpa Ahmad Manan (Hama Mbuku) dilakukan oleh dua orang bersaudara yaitu Dayat dan Zainul terhadap. Meskipun motif pembunuhan bukan sepenuhnya karena aksi mahasiswa hari itu melainkan juga terkait dengan masalah pribadi antara pelaku dan korban sebelumnya.

Terbunuhnya Kaur Desa Parado Wane pada tanggal 24 Februari 2015 melahirkan reaksi dan aksi masyarakat Parado Wane yang merupakan kerabat dan keluarga dekat almarhum, maupun masyarakat luas. Hal tersebut sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Parado Wane, dimana masyarakat lain dipaksa untuk terlibat untuk membantu membalas atas kematian keluarganya. Masyarakat yang tidak ikut membantu diancam akan dihancurkan rumahnya. Dan itu dirasakan oleh beberapa orang pemuda Parado Rato yang menikah dengan gadis Parado Wane serta tinggal di Parado Wane.

Saya mengalami kondisi yang serba dilematis utamanya yang berkaitan dengan rencana penyerangan balasan ke Desa Parado Rato, karena Parado Rato adalah desa saya dan keluarga besar saya. Akhirnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saat ada intruksi untuk kumpul, maka saya pun turut kumpul dan berpartisipasi meskipun menolak untuk terlibat dalam aksi penyerangan. Sehingga posisi saya selalu dibelakang mereka.⁸⁶

⁸⁶Kaharuddin (32 tahun), Pemuda Parado Wane, *Wawancara*, Bima, 10 April 2017.

Keberadaan Konflik menegaskan suatu proses perubahan sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada konflik tidak ada suatu bentuk pemecahan terhadap suatu permasalahan sosial yang ada. Konflik hadir karna ada kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok, adapun kepentingan itu berada di kecamatan Parado sebagai salah satu wilayah di Kabupaten NTB yang memiliki kekayaan alam baik yang berada di atas tanah maupun yang berada dibawah tanah. Potensi daerah tersebut dalam pertambangan membuat para pemangku kebijakan mengeluarkan izin pertambangan. Hal ini tentunya tidak salah mengingat dalam amandemen UUD 1945 juga dijelaskan bahwa Sumber Daya Alam dikuasi oleh Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebagai Representasi dari Masyarakat tentunya memiliki Hak dalam menentukan pemberdayaan potensi Alam di Daerahnya. Ketika suatu daerah memiliki potensi tambang yang besar, maka upaya untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya tersebut oleh Pemerintah sangat dimungkinkan.

Masyarakat Kecamatan Parado khawatir jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan. Masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal mengetahui kehadiran perusahaan tambang. Sehingga ketika ada aktifitas pertambangan, warga tidak kaget. Termasuk sebelum izin diberikan pada perusahaan tersebut. Kenyataannya, masyarakat justru dikagetkan dengan adanya aktifitas pertambangan berupa penggalian pencarian potensi sumber daya alam di daerah mereka, kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harusnya melakukan berbagai macam cara yang intensif untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, bukan serta merta mengeluarkan kebijakan yang di lain pihak merugikan masyarakat. Jika yang terjadi di lapangan adalah konflik tengah berlangsung karena masalah tersebut, maka cara penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui negosiasi yang di negosiatori oleh DPRD Kabupaten Bima. semestinya DPRD memiliki wewenang untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak akan tetapi Tampaknya, eksploitasi agraris dari kaum kapitalistik dan Pemerintah Kabupaten Bima yang demikian sistemik di dalam berbagai aspek, terlihat dalam konstalasi hubungan antara negara dan masyarakat yang selama ini berlangsung di Kecamatan Parado Kapupaten Bima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keberadaan perusahaan tambang PT. Sumbawa Timur Mining (STM), yang terdapat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima telah berdampak nyata dalam mempengaruhi pola interaksi sosial dan pola hubungan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yaitu Masyarakat Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Perubahan pola interaksi sosial masyarakat sangat jelas kelihatan terutama jika dibandingkan dengan keadaan sebelum perusahaan tambang Emas oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM) masuk dan setelah PT. Sumbawa Mining beroperasi. Perubahan pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat sebelum PT. Sumbawa Timur Mining masuk adalah pola interaksi sosial yang bersifat asosiatif berupa hubungan kerjasama yang bersifat intim dan akrab antara satu orang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Hubungan-hubungan yang bersifat asosiatif tersebut tidak hanya berlangsung di dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri saja, tetapi juga dapat berlangsung pada masyarakat secara luas. Singkat kata, interaksi sosial yang terjadi pada Masyarakat Kecamatan Parado sebelum industri tambang masuk adalah interaksi sosial yang bersifat asosiatif.

Namun, setelah PT. Sumbawa Timur Mining melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Parado, secara otomatis dapat merubah pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pola interaksi sosial yang terjadi setelah masuknya industri pertambangan emas oleh PT. Sumbawa Timur Mining adalah lebih diwarnai oleh interaksi sosial yang bersifat disasosiatif atau hubungan sosial yang bersifat konfliktual. Pertentangan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (antar keluarga), masyarakat dengan pihak perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah (Kabupaten Bima).

Kehadiran industri pertambangan oleh PT. Sumbawa Timur Mining hanya membawa perpecahan, permusuhan dan konflik dalam masyarakat yang berujung pada hubungan disharmonis antara Masyarakat dengan pemerintah. Konflik yang terjadi dalam masyarakat seperti terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pihak perusahaan, antara masyarakat dengan pihak pemerintah (Kabupaten Bima).

Melacak resistensi masyarakat Kabupaten Bima terhadap kebijakan kepala daerah dalam hal ini Bupati Bima yang berkaitan dengan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang mangan dan emas menunjukan demokrasi semu yang hanya secara prosedural, tidak adanya ruang publik untuk berpartisipasi. Siklusnya rakyat hanya berpartisipasi sebatas pada pesta prosedural demokrasi (Pemilihan Kepala Daerah) setiap lima tahun. Hak memilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah secara nyata dan bermakna secara tidak langsung rakyat memberikan aspirasi kepada figur yang terpilih sebagai pemimpin politik. Tetapi,

pada konteks kebijakan, yakni komposisi, bentuk, dan konstruksi (konfigurasi) politik untuk partisipasi rakyat dalam formulasi dan implementasi kebijakan belum terwujud.

Hal ini, ditandai oleh adanya resistensi masyarakat terhadap izin eksplorasi dan eksploitasi tambang mangan dan emas berdasarkan Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Bima bernomor 188/2010 kepada PT Sumbawa Timur Mining.

Kebijakan tersebut lebih kepada pemahaman kebijakan yang bersifat *top down* menempatkan garis lurus (kesamaan pemahaman) pengambil keputusan dengan masyarakat disaat keputusan politik tersebut diimplementasikan. bahwa dampak dari kebijakan itu hanyalah merupakan persoalan instrumental belaka, sehingga dalam suasana sosial, ekonomi dan politik yang bagaimanapun, selalu mampu dikontrol sepenuhnya oleh sang pemilik alat, yakni pembuat kebijakan. Padahal, dampak kebijakan, entah itu berada pada ranah kebijakan sosial yang sederhana sekalipun beserta semua proses-prosesnya sebagai pemicu yang melahirkan dampak sering punya hukum-hukumnya tersendiri. Sangat mustahil rakyat tidak melegitimasi suatu keputusan politik jika suatu keputusan telah disepakati bersama rakyat. Artinya tidak ada ruang partisipasi dalam proses formulasi kebijakan eksplorasi dan eksploitasi tambang mangan dan emas di Kabupaten Bima.

Terjadinya disharmoni relasi dalam keputusan politik antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Masyarakat dengan Masyarakat, Kolaborasi kekuasaan Negara dengan *private sector* mengakibatkan terjadinya tirani otoritarian dan kapitalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Tirani otoritarian dan keberpihakan

kebijakan pada kapitalisasi (pemilik modal) terjadi di Kabupaten Bima yang mendeskripsikan masyarakat sebagai korban Represivitas aparatur Pemerintah.

Bagi mereka yang mendukung adanya penambangan emas di Kecamatan Parado ini disebabkan karna rancangan penambangan emas yang masih pada tahap eksplorasi (SK Bupati Bima No: 188 Tahun 2010), dan mengetahui kandungan alam yang ada didaerah melalui ekplorasi tidaklah merugikan masyarakat sama sekali karena mereka sudah diberikan bantuan, dan oleh karena eksplorasi ini adalah perintah langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Bima maka haruslah dipatuhi.

B. Implikasi

Setelah melakukan penelitian tentang ekonomi politik di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut

1. Kepada pemerintah agar kiranya mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam konsolidasi. Khususnya pada kasus pertambangan.
2. Kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan kondisi dan upaya-upaya provokasi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidakbertanggung jawab
3. Kepada stakeholder (perusahaan, pemerintah dan seluruh masyarakat) agarkiranya harus memperhatikan kondisi ekologis dan sosial dalam suatu daerah sebelum melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalam suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet.XIV ; Jakarta:Rienaka Cipta, 2010.
- Abubakar, M. Dahlan K.H. Muhammad Hasan, *BA Guru, Tabib dan Misteri Jin* (Cet. I; Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin Makassar, 2012
- Arsip Pegawai Kecamatan Parado di Ambil dari Pegawai Camat Parado Kabupaten Bima pada saat Peneliti Melakukan Wawancara di Kantor Camat. Selasa Taggal 25 Februari 2017.
- David P. Lavine, James A. Caporaso, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Lihat juga dalam buku Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Politik, Kajian Teori dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Erwin Muhammad. "Tesis" *Resistensi Politik Masyarakat terhadap Korporasi: Kekerasan Massa dalam Aksi Penolakan izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2014.
- Erani Yustika, Ahmad, *Ekonomi Politik, kajian teoritis dan analisis empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.
- Katalog, *Kecamatan Parado dalam angka 2016* (Bima: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2016.
- Kantor UPT DIKPORA Kecamatan Parado 2016.
- LARD NTB, *Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan di Lambu Bima NTB dengan IUP Nomor 188.45/346/2010 dan Model Penyelesaian Konflik yang Tepat untuk Meminimalisir Benih Konflik Terkait Izin Pertambangan di Dompu 26 November 2012*, di akses pada halaman:<http://lardntb.blogspot.co.id/2014/02/belajar-resolusi-konflik-kasus-tambang.html?m=1>,
- Lloyd Pettiford & Jill Steans, *Hubungan Internasional: Perpektif dan Tema*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Volume XIII*. Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2004.

- M. Alan Malingi & Hilir Ismail, Sultan Abdul Kahir 11 *Sultan Bima Ke XIV* Mataram: Mahani Persada, 2010 Media Garda Asakota “Kaki Korban Penembakan di Parado di Amputasi” <http://www.gardaasakota.com/2011/03/kaki-korban-penembakan-di-parado.html?m=015/03/2011> diakses 20 Juni 2017.
- Mawardin, *Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Israel dalam Perspektif Ekonomi Politik*, Makassar: Unhas, 2011.
- Nursiah, Disa “Konsep Hukum Islam dalam Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia: Kasus Tarakan Jl. Ampera Jakarta” dalam Muhammad Shuhufi, *Konstruksi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Pustaka al-Maida, 2017.
- Nawir Messi, Muhammad, *Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Pengambilalihan Akuisisi Saham Perusahaan Easyern Star Resources Pty Ltd Oleh Perusahaan Vale Austria Holdings GmbH*, Jakarta: Versi Publik, 2012.
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. XXXVII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tohari, Amin dkk, *Dinamika Konflik dan kekerasan di indonesia*, (Jakarta: Instituti Titian Perdamaian, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Cet. V; Jakarta: Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

GAMBAR I

Hari dan Tanggal Wawancara : Selasa, 09 Mei 2017
Lokasi dan Waktu Wawancara : Kantor Camat Parado, -10:45 Wita
Nama dan Umur Informan : Baharudin S.sos,. -55 Tahun
Pekerjaan Informan : Camat Parado



GAMBAR II

Hari dan Tanggal Wawancara : Senin, 15 Mei 2017
Lokasi dan Waktu Wawancara : Kantor Desa Kanca 12:45 Wita
Nama dan Umur Informan : Zumadi Abubakar
Pekerjaan Informan : Sekretaris Desa



GAMBAR III

Hari dan Tanggal Wawancara : Rabu, 10 Mei 2017
Lokasi dan Waktu Wawancara : Kantor Desa Parado Wane, -09:45 Wita
Nama dan Umur Informan : Jamaluddin, 43 Tahun
Pekerjaan Informan : Kepala Desa Parado Wane



GAMBAR IV

Hari dan Tanggal Wawancara : Selasa, 09 Mei 2017
Lokasi dan Waktu Wawancara : Kediaman, -02 :45 Wita
Nama dan Umur Informan : Fry Hari Faturrahman, 26 Tahun
Pekerjaan Informan : Sekretaris Desa



GAMBAR V

Hari dan Tanggal Wawancara : Jum,at, 12 Mei 2017
Lokasi dan Waktu Wawancara : Kediaman,-14 :43 Wita
Nama dan Umur Informan : Ahmadin, 30 Tahun
Pekerjaan Informan : Swasta



GAMBAR VI

Hari dan Tanggal Wawancara : Jum,at, 12 Mei 2017
Lokasi dan Waktu Wawancara : Kantor Desa Kuta Parado, 10:45 Wita
Nama dan Umur Informan : Akbar Tanjung., SH. 28 Tahun
Pekerjaan Informan : Sekretaris Desa

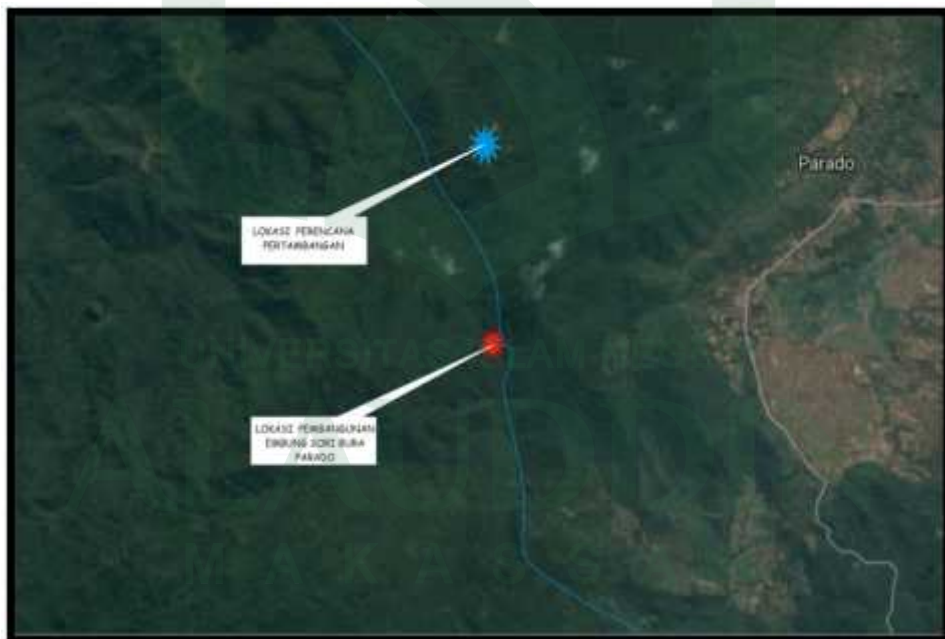


PETA

Peta Wilayah Kecamatan Parado Dalam Angka 2016



Peta Lokasi Perencanaan Pertambangan dan Lokasi Pembangunan Embun Sori Bura Parado (Bendungan Sungai Putih).





Abdul Khalik dilahirkan di Desa Parado Rato Kab. Bima, Provinsi NTB lahir pada tanggal 07- Februari Tahun 1995, Penulis adalah anak pertama yang merupakan buah cinta dari pernikahan Syamsuddin Ahmad dan Fatimah Ahmad.

Penulis memulai pendidikan formal di bangku SDN Inpres Parado II pada tahun 2001-2008. MTs Al_Mukhlisin Salama Parado 2008-2011, MA AL_Mukhlisin Salama Parado 2011-2013.

Setelah lulus MA penulis melanjutkan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Alhamdulillah selesai pada bulan Agustus 2017.

Selama kuliah penulis aktif pada beberapa organisasi baik internal maupun eksternal kampus:

Diantara organisasi yang pernah digeluti penulis diantaranya : Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Parado (IMPAR) Makassar periode 2014-2015, , Pengurus HMJ Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Tahun 2016, PRAMUKA UIN Alauddin Makassar, HMI Komisariat Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 dan melakukan kembali LK Satu pada Fakultas Feby pada tahun 2015, PMII mapaba pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2014. Himpunan Mahasiswa Bima Dompus (HMBD) tahun 2016. Persatuan Mahasiswa Bima Dompus (PMBD) tahun 2016, Rumah Tulis tahun 2016. Anggota Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an (LPPTKA) Kota Makassar Tahun 2015-2019.

